

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN TERHADAP PERANGKAT
DESA DI KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru



SHINTA DEVIANI
NPM :127110491

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PRORAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Shinta Deviani
NPM : 127110491
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 29 Juni 2019

Pembimbing I



Drs. Parjiyana., M.Si

Pembimbing II



Andri Kurniawan, B.PM.,M.Si

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Ketua,



Hendry Andry, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Shinta Deviani
NPM : 127110491
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan
Pembinaan Terhadap Perangkat Desa di Kecamatan
Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai , relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian komprehensif skripsi fakultas ilmu sosial dan politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana bidang ilmu-ilmu sosial.

Pekanbaru, 29 Juni 2019
Sekretaris,

Ketua,

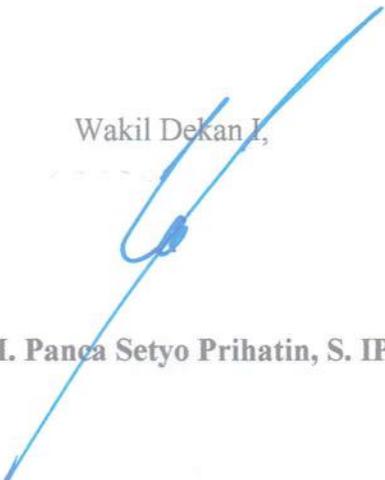

Hendry Andry, S.Sos., M.Si


La Ode Syarfan, SE., M.Si

Anggota


Drs. Parjiyana., M.Si

Anggota


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. IP, M.Si


Nurmasari, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

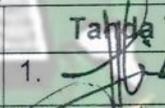
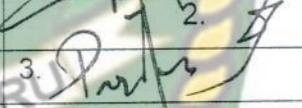
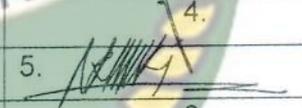
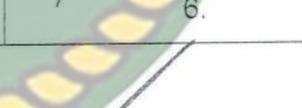
=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 579/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 28 Juni 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Sabtu tanggal, 29 Juni 2019 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Shinta Deviani
NPM : 127110491
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat dalam Melakukan Pembinaan terhadap Perangkat Desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hilir.**
Nilai Ujian : Angka : " 75 " ; Huruf : " B + "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

Dokumen ini adalah Arsip Minit :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	La Ode Syarfan, SE., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Parjiyana, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Andri Kurniawan, BFM., M.Si.	Anggota	4. 
5.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 29 Juni 2019
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.
Wakil Dekan I Bid Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Shinta Deviani
NPM : 127110491
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan
Pembinaan Terhadap Perangkat Desa di Kecamatan
Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 29 Juni 2019
Ketua,
Sekretaris,

Ketua,



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

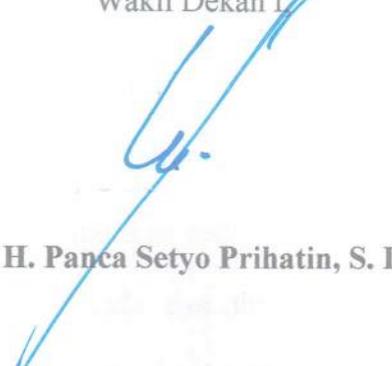
Sekretaris,



La Ode Syarfan, SE., M.Si

Turut Meyetujui,

Wakil Dekan I



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S. IP, M.Si

Prodi Administrasi Publik
Ketua



Hendry Andry, S.Sos, M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan Segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah Swt karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Asministrasi Pubik Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari usulan peneitian ini adalah : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.**

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu di sini, namun sebagai ucapan terimakasih penulis maka disini penulis ingin mengucapkan ribuan terimakasih pada :

1. Bapak Prof. Dr.H Syafrinaldi,S.H.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau,
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Drs. Parjiyana, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan
5. Bapak Andri Kurniawan, B.PM.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan pada penulis sehingga selesainya penelitian ini
6. Ayahanda dan ibunda serta tidak lupa adinda yang banyak memberikan dorongan moril pada penulis

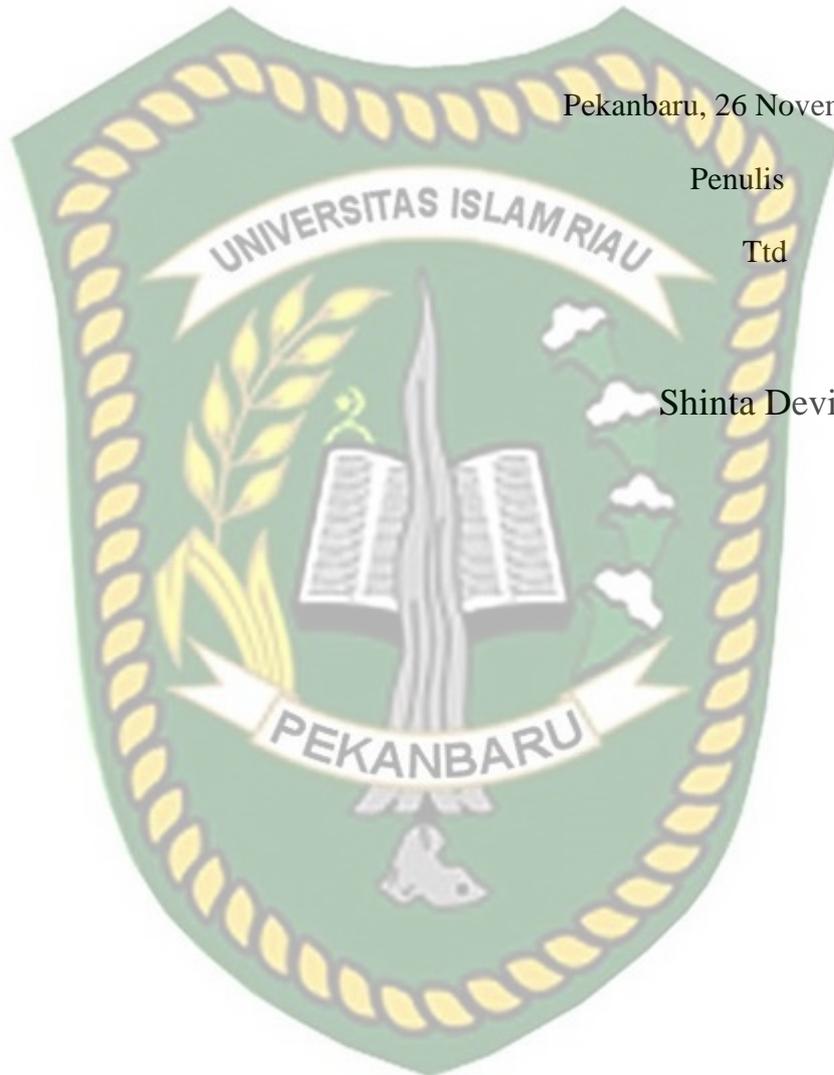
Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih pada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini semoga amal ibadahnya dapat di balas oleh Allah SWT Amin

Pekanbaru, 26 November 2018

Penulis

Ttd

Shinta Deviani



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	18
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	18
1. Tujuan Penelitian	18
2. Kegunaan Peneliti	18
BAB .II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	20
B. Kerangka Pikir	40
C. Konsep Operasional	41
D. Operasional Variabel	43
E. Teknik Pengukuran	44
BAB.III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Populasi dan sampel	50
D. Jenis Dan Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Analisis Data	52
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	54

BAB.IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Geografis Kabupaten Rokan Hulu.....	55
B. Keadaan Penduduk	57
C. Pendidikan	60
D. Tugas Pokok dean Fungsi.....	62

BABV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	66
B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	67

BAB.VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	94

DAFTAR KEPUSTAKAAN	96
--------------------------	----

LAMPIRAN	99
----------------	----



DAFTAR TABEL

I.I :	Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah KK Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	15
II.1 :	Operasional Variabel Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	43
III.1 :	Jumlah Populasi dan Sampel	50
III.2 :	Jadwal Waktu Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	54



DAFTAR GAMBAR

11.1: Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa DiKecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.....	40
--	----



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Shinta Deviani**
NPM : 127110491
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari piak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Novemver 2018
Pelaku Pernyataan

Shinta Deviani

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MELAKUKAN
PEMBINAAN TERHADAP PERANGKAT
DESA DI KECAMATAN RAMBAH
KABUPATEN ROKAN HULU**

ABSTRAK

Shinta Deviani

Kata Kunci : Evaluasi, Pembinaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pembinaan Camat terhadap Perangkat Desa di Kecamatan Rambah khususnya mengenai Administrasi Kependudukan.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tugas camat dalam membina perangkat desa khususnya mengenai Administrasi Kependudukan

Tipe penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif dengan menggunakan survey deskriptif yaitu penelitian dengan maksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan komprehensif terhadap suatu fenomena sosial, kemudian peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun data. Selanjutnya pada penelitian lapangan menggunakan kuesioner guna menghimpun data, Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dalam hal ini diuraikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya di uraikan sesuai dengan identitas responden masing-masing serta indikator variable yang di peroleh melalui kuesioner guna penarikan tanggapa responden guna mengetahui pelaksanaan tugas camat yang akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan dan saran, Diketahui Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu maka dapat di kategorikan kurang baik yang dilihat dari antara lain Pemberian Bimbingan yang dilakukan Camat belum berjalan dengan baik karena tidak dilakukan secara rutin dan dalam Memberikan pengarahan masih ada pengarahan yang kurang di mengerti oleh Perangkat Desa sehingga arahan yang di sampaikan tidak maksimal jadinya, serta, dalam memberikan dan latihan tidak seluruh Perangkat Desa yang menerima dan pelatihan selanjutnya dalam memberi intruksi-intruksi tidak jelasnya instruksi yang di sampaikan sehingga sering salah penerimaan oleh Perangkat Desa dan mengenai adanya literature/buku Camat tidak ada memberikan buku petunjuk baru tetap menggunakan yang lama juga.

EVALUATION OF CAMAT DUTY IMPLEMENTATION IN
CONDUCTING TO THE DEVICE
VILLAGE IN THE LAND CENTER OF RAMBAH OF ROKAN HULU

ABSTRACT

Shinta Deviani

Keywords: Evaluation, Guidance

The purpose of this study are: To know the results of the implementation of guidance of Village Head Terak terhadap in District especially regarding Population Administration. To know the factors that inhibit the duty of the sub-district head in fostering and monitoring the village apparatus especially regarding Population Administration. This type of research is quantitative research using descriptive survey that is research with the intention to make meticulous and comprehensive measurement toward a social phenomenon, then researcher develop concept and collect data. Furthermore, in field research using questionnaires to collect data, data analysis techniques that the authors use in this study is descriptive analysis in this case is described in the form of tables and subsequently in uraikan in accordance with the identity of each respondent as well as indicators of variables obtained through questionnaires for withdrawal Tanaggapa respondents to know the implementation of the tasks of the sub-district who finally made the withdrawal of conclusions and suggestions, known Evaluation of the Implementation of Duties of Camat In Conducting And Supervising Against Village Devices In Subdistrict Logas Land Land Kuantan Singingi District can be categorized less well seen from among other Giving Guidance The Camat has not done well because it is not done routinely and in Providing guidance there are still directives that are not understood by the Village Device so that the directives are not delivered maximum, and, in giving and Exercises not all Village Devices receiving and subsequent training in giving instructions unclear instructions are conveyed so often incorrectly received by the Village Device and on the existence of the Camat's literature / books there is no new user guide to keep using the old one as well

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Oleh karena itu secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuan bidang pelayanan yaitu : menjamin keamanan, memelihara ketertiban, menjamin ditetapkannya perlakuan yang adil, melakukan pekerjaan umum, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, menerapkan kebijakan ekonomi dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungannya.

Sebagai mana ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan di bentuknya pemerintahan negara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Amandeman kedua dalam pasal ini tercantum tentang bagaimana pemerintahan daerah dalam mengatur daerahnya masing-masing yaitu sebagai berikut:-

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintah daerah, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah daerah, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang diatur oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
6. Pemerintah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah . Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemeritahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan

daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Didalam undang-undang nomor Sementara itu urusan-urusan selain diatur oleh pemerintah pusat sisanya diserahkan pada Pemerintah Daerah. Adapun urusan-urusan yang diserahkan pada daerah provinsi menyatakan urusan wajib yaitu :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertahanan.
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal. Dan
- o. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan fungsi utama Pemerintah Daerah UU No. 23 Tahun 2014 yakni .sebagai pelayan masyarakat, diperlukan kebijakan politik yang kuat dari Bupati/Walikota dan DPRD untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayan masyarakat. Oleh karena itu kedudukan, fungsi serta kewenangan Camat sebagai Perangkat Daerah perlu diperkuat. Sejalan dengan hal tersebut, perlu pula pemberian anggaran, personil serta saran dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

UU No 23 Tahun 2014 menerangkan bahwa Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan sebagaimana dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Salah satu tugas umum pemerintahan kecamatan adalah Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan yang mana dalam hal ini mengenai penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Dengan demikian kedudukan Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.

Kewenangan camat terbagi dua macam, yaitu :

Kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya. Tugas umum pemerintahan juga merupakan kewenangan atributif. Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- 
- a) Perizinan
 - b) Rekomendasi
 - c) Koordinasi
 - d) Pembinaan
 - e) Pengawasan
 - f) Fasilitasi
 - g) Penetapan
 - h) Penyelenggaraan, dan
 - i) Kewenangan lain yang dilimpahkan .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terbaru No.17 Tahun 2018 tentang kecamatan, selain menjalankan perannya sebagai pembina dan pengawas pemerintahan desa, Camat juga melaksanakan berbagai urusan administrasi kependudukan dan perijinan, serta pelayanan dasar sektoral mulai dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan upaya-upaya konkrit mensejahterakan masyarakat. Yang kemudian menjadikan Camat pada posisi strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik setelah kabupaten/kota, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa arti penting pembinaan adalah untuk menjadikan sesuatu lebih baik dari sebelumnya yang dilakukan Camat pada perangkat desa, sedangkan arti penting pengawasan adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan perangkat desa,

maka dapat dikatakan pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan dalam konteks pengelolaan administrasi kependudukan di desa.

Camat dalam memimpin kecamatan bertugas :

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum
- b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- c) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
- e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- f) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan
- g) **Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa**
- h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang ada dikecamatan
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijeaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dan desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan peraturan menteri dalam negeri tentang perubahan pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur melalui peraturan nomor 113 Tahun 2014. Definisi keuangan desa menurut permendagri 113/2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pembinaan dan Pengawasan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 :

- 1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh direktur jenderal bina pemerintahan desa dan inspektur jenderal kementerian dalam negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
- 2) Pemerintah daerah provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota, dan bantuan keuangan kepada desa.
- 3) Bupati atau walikota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten atau kota.

Administrasi pemerintahan desa adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan kepala desa untuk mencapai tujuannya itu pemerintahan desa yang mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan terwujudnya demokrasi secara nyata guna meningkatkan taraf hidup masyarakat (wijaya, 2008;89).

Administrasi desa sebagai alat penggerak pemerntaan desa sangat menentukan pengelolaan pemerintahan desa. Administrasi Desa meliputi:

1. Administrsi umum yang terdiri dai buku keputusan desa, buku keputusan kepala desa, buku kekayaan desa, buku agenda, buku ekspedisi, buku aparat desa, dan buku tanah desa.
2. Administrasi kependudukan meiputi: buku penduduk, buku penduduk sementara, buku perkembangan penduduk, buku kartu keluarga, buku tanda penduduk, buku jumlah penduduk.
3. Administrasi keuangan desa meiputi: Buku anggaran desa, buku kas umum, buku kas pembantu (wijaya, 2000;89)

Dari penjelasan singkat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa camat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan pemerintahan desa. Sebaai ujung tombak peayanan terhadap masyarakat, camat mengemban tugas dan dtanggung jawab yang harus dilaksanakan daam rangka peaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan.

Tujuan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa adalah:

1. Untuk meningkatkan tertib administrasi pemerintahan desa
2. Mengidentifikasi dan memberikan solusi pemecahan masalah yang timbul dalam proses maupun penyelesaian administrasi desa

Pembinaan administrasi desa meliputi:

1. Pembinaan penyusunan siklus tahunan desa
2. Pembinaan administrasi keuangan desa
3. Pembinaan pengelolaan tanah kas desa
4. Pembinaan penyusunan dan pengelolaan alokasi dana desa

Kegiatan Pembinaan Bidang Administrasi Desa meliputi:

1. Camat, Pejabat Struktural Kecamatan turun langsung ke kantor desa, untuk melakukan kegiatan Monitoring langsung terhadap kehadiran dan kedisiplinan perangkat desa.
2. Membina administrasi desa yang belum sesuai dengan tata naskah dinas dan aturan yang berlaku.
3. Memonitor atau melihat atau menginfentalisir langsung terhadap kendala aparatur desa dalam melaksanakan tupoksi masing-masing.

Pembinaan Ada Dua Bagian meliputi:

1. Pembinaan Langsung (terintegrasi) Oleh Camat kepada Seluruh Perangkat Desa:

- Apel Pagi Gabungan bersama setiap bulan yang dihadiri oleh seluruh Kades, BPD, Perangkat Desa, RT, Rw untuk melakukan evaluasi kehadiran / sidak dadadak.

2. Pembinaan Khusus oleh camat dan Dinas Pemerintahan Desa disetiap desa:

- Dalam bentuk Kuliah Umum (sosialisasi) yaitu duduk, dengan menggunakan Slite, kegiatan ini dianggarkan dalam APBDes Desa se Kecamatan Rambah, meliputi: Masalah keuangan desa, dilengkapi Nara Sumber dan disertai Makan dan Minum.

Pembinaan administrasi keuangan desa meliputi pembinaan:

1. Buku Anggaran Desa
2. Buku Kas umum
3. Buku Kas Pembantu Terdiri :
 - a. Buku pembantu pendapatan per jenis pendapatan TKD
 - b. Buku pembantu pendapatan atas pungutan desa
 - c. Buku pembantu lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan

Program pembinaan desa dikecamatan rambah kabupaten rokan hulu :

1. Program peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa, serta badan permusyawaratan desa (BPD)
2. Program tata kelola pemerintahan yang baik, serta mewujudkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) sesuai tugas pokok dan fungsinya masing masing
3. Program peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Program peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat
5. Program peningkatan ketertiban dan keamanan desa
6. Program peningkatan fasilitas dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian
7. Program pengembangan lembaga ekonomi desa yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakatProgram pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan
8. Program pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan
9. Program peningkatan upaya kesehatan masyarakat
10. Program peningkatan minat baca masyarakat
11. Program pelestarian budaya dan adat istiadat desa
12. Program peningkatan sarana olahraga dan kepemudaan
13. Program penyelamatan lingkungan hidup

14. Program peningkatan kualitas iman dan ketaqwaan umat beragama serta fasilitas keagamaan Program peningkatan kemampuan dan profesionalisme anggota dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa
15. Program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
16. Program penyusunan perencanaan pembangunan desa yang terarah, terpadu, aspiratif, dan tanggap terhadap perubahan
17. Program pelaksanaan pembangunan secara terbuka, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengutamakan skala prioritas desa dan tingkat manfaat untuk masyarakat desa
18. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui swadaya serta gotong royong
19. Program pemberian bantuan dan perlindungan sosial untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup masyarakat miskin
20. Program pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat miskin.

Administrasi Desa sebagai alat penggerak pemerintahan Desa sangat menentukan pengelolaan pemerintahan desa. Administrasi Desa meliputi :

1. Administrasi umum yang terdiri dari buku Keputusan Desa, Buku Keputusan Kepala Desa, Buku Kekayaan Desa, Buku Agenda, Buku Ekspedisi, Buku Aparat Desa, dan buku Tanah Desa.

2. Administrasi kependudukan meliputi: Buku penduduk, Buku Penduduk sementara, Buku perkembangan penduduk, Buku kartu keluarga, Buku tanda penduduk, Buku jumlah penduduk.
3. Administrasi keuangan desa meliputi: Buku anggaran Desa, buku Kas umum, Buku Kas pembantu (Wijaya, 2000;89)

Dari penjelasan singkat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa. Sebagai ujung tombak pelayanan terhadap masyarakat, Camat mengemban tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan.

Tabel I.4 : Rekapitulasi Jumlah Populasi Perangkat Desa Di Kantor Camat Rambah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2017

NO	PERANGKAT DESA	JUMLAH DESA
1.	Kepala Desa	13
2.	Sekretaris Desa	13
3.	Pelaksana teknik	
	- Kaur Pemerintahan	13
	- Kaur Pembangunan	13
	- Kaur Keuangan	13
	- Kaur Kesra	13
	- Kaur Umum	13
4.	Pelaksana Wilayah	13
	JUMLAH	104

Sumber : Kantor Camat Rambah Tahun 2017

Kecamatan Rambah kabupaten Rokan Hulu dengan jumlah penduduknya sekitar 45.757 orang yang terdiri dan 22.924 laki-laki dan 23.699 perempuan dengan jumlah KK 11.084 yang tersebar di 1 kecamatan dan 13 desa yang ada dikecamatan Rambah, beberapa desa sebagaimana diharapkan. Selanjutnya dapat dilihat kondisi penduduk berdasarkan etnis kelamin di desa di kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat dari data berikut ini:

Tabel I.4 : Jumlah penduduk dirinci menurut jenis kelamin dan jumlah KK di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

No	Desa/kelurahan	Jenis kelamin		Jumlah KK	Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan		
1	2	3	4	5	6
1	Pasir pangaraian	2675	2950	1220	5625
2	Rambah tengah utara	1692	2966	886	4658
3	Rambah tengah hilir	1682	1442	823	3124
4	Rambah tengah hulu	1479	1420	517	2899
5	Rambah tengah barat	1554	1515	522	3069
6	Menaming	1419	1400	451	2819
7	Pasir baru	766	736	312	1502
8	Sialang jaya	778	643	316	1421
9	Tanjung belit	992	962	691	1088
10	Babussalam	1420	1252	798	2672
11	Pematang berangan	2400	2651	1200	5051
12	Suka maju	2087	1990	1005	4077
13	Koto tinggi	3230	3120	2068	6350
14	Pasir maju	750	652	275	1402
Jumlah		22924	23699	11084	45757

Sumber: Kantor Camat Rambah Tahun 2017

Sehubungan dengan itu dapat dikatakan perangkat desa adalah setiap orang yang membantu tugas pemerintahan desa dengan bidang tugas antara lain

pelayanan umum, pembangunan, dan keuangan, berikut disajikan jumlah perangkat desa yang ada di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yaitu :

Dari beberapa bidang tugas perangkat desa maka salah satunya adalah melakukan pelayanan umum, yang mana dalam melakukan pelayanan jumlah perangkat desa tidak bisa menangani masyarakat yang berurusan karena jumlahnya banyak, sehingga lambat penanganannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa salah satu tugas Camat adalah melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi terutama mengenai administrasi kependudukan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan sesuai dengan PP No 72 tahun 2005 bahwa tugas Desa melakukan wewenang dalam urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dari salah satu wewenang tersebut terindikasi dalam perangkat desa terutama pada seksi pelayanan umum, selanjutnya dapat di katakan bahwa arti penting pembinaan adalah untuk memberikan arahan dan petunjuk pada aparat desa agar bekerja dengan lebih baik, sedangkan arti penting pengawasan adalah untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan terhadap setiap hasil kerja yang di lakukan perangkat desa, maka dapat di ketahui dengan adanya pembinaan yang baik oleh Camat maka kinerja dari perangkat desa akan berjalan dengan optimal selain itu pengawasan yang di lakukan Camat akan menambah hasil kinerja perangkat desa menjadi lebih baik lagi

Kegiatan pembinaan yang dilakukan Camat diketahui bahwa belum terlaksana dengan baik dan optimal, hal ini terlihat dari adanya perangkat desa yang belum memahami tugas dan kewajibannya dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, hal ini terbukti dengan adanya perangkat desa yang belum mengerti dan memahami proses pembuatan administrasi surat menyurat pemerintahan desa dan diketahui juga bahwa perangkat desa tidak berpegang teguh terhadap pedoman dan aturan yang ada.

Berdasarkan hasil survei awal penulis ditemukan fenomena sebagai berikut :

1. Diduga Camat kurang melakukan pengawasan terhadap desa yang belum sepenuhnya memenuhi kelengkapan administrasi desa yaitu pada bentuk administrasi umum khususnya di desa hulu teso, sako marga sari, suka raja. Desa ini menurut penulis belum mempunyai kelengkapan administrasi umum karena keterlambatan administrasi desa menyebabkan pemerintah kecamatan terlambat untuk mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan administrasi desa yang telah dilaksanakan dan hal ini juga berdampak pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan data dan informasi mengenai administrasi desa.
2. Masih kurangnya camat memberikan pendidikan dan latihan terhadap pemerintah desa berupa supervisi, fasilitas dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memberi judul penelitian ini sebagai berikut; **“Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah hasil Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa saja faktor penghambat dari Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
 - A. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan pembinaan Camat terhadap Perangkat Desa di Kecamatan Rambah.
 - B. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat tugas camat dalam membina perangkat desa.
2. kegunaan penelitian

- A. Diharapkan berguna sebagai bahan informasi bagi instansi terkait, terutama pegawai-pegawai kanor camat rambah.
- B. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat terutama penulis mengenai evaluasi kecamatan
- C. Sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan, yang akan meneliti permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrare*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administratio* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”. Di Italia disebut *amministrazione*, sedangkan di Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat disebut *administration*.

Secara konseptual administrasi dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu sebagai berikut:

Administrasi terbagi atas dua pengertian yaitu: (1). Administrasi dalam arti sempit, diartikan terbatas sebagai kegiatan tata usaha (*clerical work* dan *office work*) yang berkenaan dengan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi. (2). Administrasi dalam arti luas berhubungan dengan kegiatan kerja sama dan upaya (*organisasi dan manajemen*) yang bersifat sistematis, rasional dan manusiawi yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama (Nawawi. 2013;77).

Batasan pengertian ini mengandung keseluruhan makna dari kata *administratie* (Belanda) dan *administration* (Inggris), yang mencakup dimensi,

aktivitas, dan dinamika yang muncul dalam suatu kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, termasuk dalam pemberian pelayanan.

Menurut William H. Newman dalam bukunya yang berjudul *Administration Action*, Administrasi adalah pengarahan, kepemimpinan, dan pengendalian dari usaha-usaha kelompok orang dalam rangka pencapaian tujuan yang umum atau pokok (dalam Nawawi,2013;79).

Menurut Leonard D. White administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil (*administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military, large scale or small scale*) (dalam Syafri,2012;9).

Menurut Syafri (2012;11) administrasi adalah rangkaian kegiatan (proses) usaha kerja sama sekelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

Menurut Simon mendefinisikan suatu proses yang umum ada pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun ukuran kecil (dalam Syafie,2003;3).

Menurut Silalahi (2012;11) administrasi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok manusia berdasarkan pembagian kerjasama sebagaimana yang ditentukan dalam struktur dengan pendayagunaan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Siagian (2003;2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ada beberapa hal yang terkandung dalam definisi diatas. Pertama, administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui hanya permulaannya sedang akhirnya tidak diketahui. Kedua, administrasi mempunyai unsur-unsur atau komponen tertentu yaitu adanya dua manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Mengacu pada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga, konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang tertentu. Keterangan itu cenderung dimanfaatkannya untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya.

Menurut Pasolong (2007;2) permasalahan pokok administrasi adalah siapa yang harus melayani dan dilayani dan siapa yang harus mengatur dan diatur. Dalam hal ini, manusia sebagai subjek untuk melayani dan manusia pulalah yang menjadi objek untuk dilayani. Manusialah yang harus menjaga keteraturan kehidupan sosialnya dan manusia itu sendiri yang harus memecahkan seluruh permasalahan kehidupan sosialnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi bahan baku administrasi ialah manusia. Karena manusia merupakan sumber adanya

kepentingan manusia, khususnya keberadaannya sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat. Konsekuensinya ialah administrasi bertanggung jawab terhadap kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai dari merencanakan sampai pada evaluasi demi tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam praktiknya kegiatan administrasi itu menekankan kepada kegiatan pengkoordinasian orang-orang yang bekerja sama, alat-alat dan dana yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, Jhon M. Phiffner dan RV Presthus mendefinisikan administrasi sebagai proses kerja sama secara rasional untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif (dalam Nawawi,2013;79).

Menurut Siagian (2003;7) administrasi negara secara singkat dan sederhana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara.

Objek disiplin ilmu administrasi negara adalah pelayanan publik sehingga yang perlu dikaji adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Syafiie (2003;32) dalam bukunya yang berjudul “Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia”, mengemukakan ada 7 (tujuh) hal khusus dari administrasi negara, yaitu:

- a) Tidak dapat dielakan (*unavoidable*);
- b) Senantiasa mengharapkan ketaatan (*expect obedience*);
- c) Mempunyai prioritas (*has priority*);
- d) Mempunyai pengecualian (*has exceptional*);

- e) Puncak pimpinan politik (*top management political*);
- f) Sulit diukur (*difficult to measure*);
- g) Terlalu banyak mengharapkan dari administrasi publik (*more is expected of public administration*).

Administrasi negara menurut Nawawi (2013;79) adalah administrasi mengenai negara dalam keseluruhan arti, unsur, dimensi, dan dinamikanya yang terus bergerak dan terkait dengan konteks sosial dan lingkungan yang ada disekitarnya.

Seperti dinyatakan dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) oleh LAN (dalam Nawawi. 2013;79-80) disebutkan bahwa administrasi negara yang dibangun untuk mencapai tujuan bernegara harus melakukan perubahan-perubahan terhadap kondisi lingkungan stratejik yang dihadapi; dan dalam praktiknya sistem dan proses administrasi negara banyak dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan lingkungan stratejiknya itu sendiri.

Menurut Phiffner dan Presthus administrasi negara itu meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan (*public administration involves the implementation of public policy which has been determine by representative political bodies*) (dalam Nawawi,2013;80).

2. Konsep Organisasi

Definisi organisasi banyak ragamnya, tergantung pada sudut pandang sebagai wadah, sebagai proses, sebagai perilaku, dan alat untuk mencapai tujuan. Namun demikian, definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli organisasi sekurang-kurangnya ada unsur kerja sama, orang yang bekerja sama, dan tujuan bersama yang hendak dicapai.

Ada banyak definisi mengenai organisasi karena hampir setiap disiplin ilmu maupun para praktisi membahas atau memberikan pengertian organisasi ataupun mendefinisikan apa arti organisasi dari sudut pandang mereka masing-masing. Jangan heran jika dalam sejumlah literatur mudah ditemui sejumlah definisi mengenai organisasi.

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.

Pengertian organisasi sebagai suatu wadah dan suatu proses dapat dicermati dari definisi berikut ini.

Sebagai wadah, organisasi berwujud kotak struktur yang menggambarkan hierarki, kedudukan dari orang-orang, pengelompokan orang dan pekerjaan, pola hubungan antar bagian atau unit yang ada. Organisasi sebagai proses menggambarkan berlangsungnya berbagai aktivitas dari kelompok orang dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Syafri. 2012;12).

Beberapa definisi dan pengertian organisasi itu antara lain dikemukakan Gibson, Ivancevich, dan Donelly yang dimaksud dengan organisasi adalah suatu unit terkoordinasi terdiri dari setidaknya dua orang dan berfungsi untuk mencapai suatu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran tertentu (dalam Nawawi,2013;74).

Berikutnya James D. Mooney mendefinisikan organisasi sebagai bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan bersama (Organization is the of every human association for the attainment of common purpose) (dalam Nawawi,2013;75).

Sementara itu, Herbert. A. Simon mengartikan organisasi sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang (Organization is the complex pattern of communication and other relations in a group of human being) (dalam Nawawi,2013;75).

Secara sederhana, konsep organisasi menurut Nawawi (2013;73) ialah suatu wadah atau tempat untuk melakukan kegiatan bersama, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

Menurut Syamsi (2012;13) organisasi dapat diartikan menjadi dua yaitu: administrasi dalam arti sempit/statis dan administrasi dalam arti dinamis. Dalam arti sempit organisasi adalah sebagai wadah/tempat bekerja sama bagi sekelompok orang untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti dinamis, organisasi sebagai suatu sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.

Definisi organisasi yang mengisyaratkan kerja sama secara formal dapat dicermati dari definisi berikut ini.

Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian,2003;6).

Jika sejumlah pengertian yang ada itu digeneralisasi, maka kata organisasi mempunyai dua pengertian umum yaitu sebagai berikut.

Menurut Handoko (dalam Nawawi,2013;75-76) pengertian pertama organisasi menandakan lembaga atau kelompok fungsional, seperti organisasi perusahaan, pemerintah atau perkumpulan olahraga. Pengertian kedua organisasi berkenaan dengan proses pengorganisasian, yaitu suatu cara pembagian tugas dan fungsi para anggota agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Dalam organisasi masing-masing personil atau anggota yang terlibat didalamnya diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab yang dikordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen dalam industri atau dunia kerja lainnya terlihat apabila bergerak tidaknya suatu organisasi ke arah pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu kearah tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Nawawi (2013;76) secara umum apa yang disebut organisasi formal adalah organisasi yang memiliki struktur (bagan yang menggambarkan hubungan-hubungan kerja, kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab) yang jelas, pembagian tugas yang jelas, serta tujuan yang ditetapkan secara jelas.

Organisasi publik menurut Nawawi (2013;76) adalah organisasi terbesar; dibandingkan dengan organisasi privat yang ada disekitarnya.

Organisasi publik ini dimaksudkan untuk mewadahi seluruh kepentingan lapisan masyarakat dengan ruang lingkup Negara; mempunyai kewenangan yang absah (terlegitimasi) di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum secara terlembaga, sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya, melayani keperluan masyarakat. Sebagai konsekuensinya organisasi publik semacam ini berhak memungut pajak untuk pendanaan, dan menjatuhkan hukuman sebagai sanksi penegakan peraturan.

3. Konsep Manajemen

Bagi kebanyakan orang kata manajemen bukan sesuatu yang asing, karena ia ada dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan dalam lingkup kegiatan yang paling sederhana, mereka mempraktikkan apa yang mereka sebut 'manajemen' dalam kehidupan atau keseharian mereka.

Dalam pemahaman awam, apa yang sering disebut sebagai manajemen sering menunjuk atau diasosiasikan pada semua kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara yang lebih baik dalam arti lebih efektif dan efisien. Begitu juga sebaliknya terhadap sesuatu hasil yang buruk, diasosiasikan sebagai

konsekuensi dari minimnya penggunaan manajemen atau buah dari kesalahan dalam manajemen.

Dalam berbagai kesempatan, dan untuk berbagai tujuan, penyebutan manajemen bersama dengan kata yang menempel di belakangnya sudah bukan sesuatu yang asing.

Sepertinya rangkaian kata manajemen dengan kata yang mengikutinya sudah menjadi sesuatu yang sudah dan mudah dimengerti maksudnya. Entah karena dorongan apa, ada orang yang sedikit-sedikit menyebut atau menggunakan istilah manajemen, seolah semua kegiatan, termasuk kegiatan yang paling sederhana memang memerlukan sebuah manajemen.

Menurut syafri (2012;12) hakekat manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu, manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen.

Menurut Siagian (2003;5) manajemen adalah sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui orang lain.

Menurut Handoko (2010;8) manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut J. G. Longenecker mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kegiatan manajer dalam mengambil keputusan, mengkoordinasikan usaha-usaha kelompok, dan kepemimpinan (dalam Nawawi,2013;11).

Menurut Stoner manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Nawawi,2013;12).

Jika disederhanakan manajemen sebagai suatu proses itu melihat bagaimana cara orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen mulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dan seterusnya kembali pada kegiatan awal berupa perencanaan sebagai sesuatu yang kontinum.

Melalui proses itu para pemimpin (manajer) menggunakan semua sumber daya organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses itu keberadaan orang (sumber daya manusia) adalah sumber daya terpenting bagi setiap organisasi, namun para pemimpin (manajer) tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal apabila mengabaikan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya.

Menurut Soekarno (2006;70) aktivitas manajemen dapat dipisahkan dalam aktivitas-aktivitas komponen yang meliputi :

- a) Perencanaan, adalah aktivitas-aktivitas pengumpulan data dan informasi beserta pemikiran untuk menentukan apa yang hendak dicapai, di mana semuanya itu harus dijalankan, bila mana waktunya, oleh siapa-siapa saja yang harus menjalankan;
- b) Pengorganisasian, adalah tindak lanjut untuk menyambut pelaksanaan rencana yang telah ditentukan untuk dilaksanakan;
- c) Pengkoordinasian, adalah meliputi hubungan kerja sama secara teratur dan lancar dan berbagai macam aktivitas yang harus dilaksanakan;
- d) Pengendalian, adalah mengarahkan agar seluruh aktivitas ataupun usaha tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan;
- e) Pengawasan, adalah suatu usaha agar semua dan keputusan yang telah dibuat dapat dikerjakan sesuai dengan apa yang direncanakan, diputuskan, dan dikomandokan.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi actuating justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Manajemen sebagai suatu seni adalah kegiatan dalam mencapai tujuan diperlukan kerja sama dengan orang lain, bagaimana cara memerintahkan pada orang lain agar mau bekerja sama dan seterusnya di mana semua itu diperlukan seni untuk melakukannya. Dalam konteks ini pula Follett mendefinisikan

manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain (dalam Nawawi,2013;13).

Menurut Emaya Suradinata mendefinisikan manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh Negara (dalam Nawawi,2013;21).

Sementara itu menurut Sondang P. Siagian (dalam Nawawi. 2013;21) mendefinisikan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif, akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif, serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

Sedangkan menurut Ramto manajemen pemerintahan (public management) adalah faktor utama dalam suatu administrasi publik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan sarana dan prasarana yang ada termasuk organisasi serta sumber dana dan sumber daya yang tersedia (dalam Nawawi,2013;21).

Menurut Syafri (2012;169) secara umum New Public Management (NPM) dipandang sebagai suatu pendekatan administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam dunia manajemen bisnis untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern.

Penerapan konsep NPM menyebabkan terjadinya perubahan mendasar pada administrasi publik yang dinilai kaku, birokratis, dan hierarkis ke arah yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Konsep NPM dipandang sebagai bentuk reformasi atau modernisasi administrasi publik karena NPM menawarkan desentralisasi wewenang, depolitisasi kekuasaan sehingga mendorong demokrasi.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Banyak jumlah sumber daya manusia dari suatu organisasi yang harus diurus maka dari itu perlu adanya manajemen sumber daya manusia dan selain dari jumlah SDM juga karna banyak yang beraneka ragamnya soal-soal yang menyangkut SDM dari organisasi tersebut yang menjadi urusan organisasi. Pegawai pada hakikatnya merupakan sumber daya manusia bagi suatu organisasi yang sekaligus disebut juga sumber daya manusia organisasi.

Menurut (Fathoni, 2006;10) manajemen sumber daya manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.

Yang dimaksud dengan proses manajemen sumber daya manusia adalah :

Segala proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan dari mulai perencanaan sumber daya manusia, perekrutan, penandatanganan kontrak kerja, penempatan tenaga kerja, hingga pembinaan dan pengembangan tenaga kerja guna menempatkan dan tetap memelihara tenaga kerja pada posisi dan kualifikasi tertentu serta bertanggung jawab sesuai dengan pernyataan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut (Tisnarwatidan Kurniawan Saepullah, 2013;196) secara garis

besar proses manajemen SDM dibagi dalam lima bagian fungsi utama yang terdiri dari :

1. Human resource planning, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan;
2. Personnel recruitment, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk didalamnya rekrutmen, seleksi dan penempatan serta kontrak tenaga kerja;
3. Personnel development, mengembangkan sumber daya manusia, termasuk didalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan;
4. Personnel maintenance, memelihara sumber daya manusia, termasuk didalamnya pemberian penghargaan, intensif jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja dan lain sebagainya; Personnel utilization, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk didalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi.

Menurut (Pangabean, 2002;15) manajemen sumber daya manusia adalah manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia.

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mengatur suatu kebutuhan atau pengeluaran anggaran disuatu tempat tertentu agar tercapai SDM yang teratur.

5. Konsep Pelaksanaan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah proses cara perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majoe Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildabsky mengemukakan pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Menurut Wahab (2001: 65) implementasi adalah tindakan tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan yang terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam suatu penyelesaian keputusan demi tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir

6. Teori Evaluasi

Penilaian merupakan bagian yang integral dari proses pelaksanaan system pengawasan. Penilaian merupakan suatu proses analisis data yang diperoleh

melalui proses pengawasan penilaian boleh saja atau bisa menggunakan instrumen pengawasan jika demikian halnya perbedaan mendasar antara pengawasan dengan penilaian terletak pada aspek orientasi waktu, sasaran, dan pemanfaatannya.

Terdapat Indikator Evaluasi Menurut Finance (dalam Bajuri dan Yuono), (2012: 136-137) yaitu penilaian secara menyeluruh tentang input, proses, output, dan outcome).

Untuk lebih jelasnya setiap indikator tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. *Input* yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.

Untuk dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya :

- A. Sumber daya dukungan (SDM, Uang, Sarana/prasarana)
 - B. Bahan-bahan dasar pendukung (peralatan, teknologi)
2. Proses yaitu bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk itu dikembangkan instrument yang meliputi indikatornya :
 - A. Tepat sasaran atau tidak
 - B. Tepat guna atau tidak
 - C. Efisien atau tidak
 3. *Output* (hasil) yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan. Apakah sesuatu pelaksanaan kebijakan menghasilkan produk sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan. Untuk itu dikembangkan instrument dengan indikator sebagai berikut:

- A. Tepat tindaknya sasaran yang ditujui
 - B. Beberapa besar sasaran yang tercover
 - C. Seberapa banyak kelompok sasaran yang yang ditangani
 - D. Seberapa besar keompok sasaran yang terlibat
4. *Outcome* (dampak) yaitu apakah sesuatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran dengan tujuan kebijakan. dengan indikatornya sebagai berikut :
- A. Ada atau tdak perubahan pada target/sasaran
 - B. Seberapa besar perubahan keompok sasaran
 - C. Seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran

3. Konsep Pembinaan

Pembinaan dalam tulisan ini diartikan sebagai rangkaian upaya dan metoda di kembangkan untuk meningkatkan baik wawasan maupun keterampilan personil organisasi. Konsep pembinaan juga dapat dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi.

Miftah juga menjelaskan salah satu teknik perilaku organisasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan adalah pembinaan organisasi atau di kenal dalam literatur pembinaan menurut Thoha (2003;182) adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik. Adapun dua unsur dari pengertian ini, yakni: pertama pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan proses

atau pernyataan tujuan dan yang kedua pembinaan kepada perbaikan kepada sesuatu. Sebagai organizational development, yang dimaksud perilaku organisasi adalah suatu bidang studi organisasi yang berhubungan dengan semua aspek kegiatan manusia dalam usahanya melakukan penyempurnaan yang terencana dalam suatu organisasi.

Penyempurnaan yang dilakukan itu meliputi usaha penyempurnaan kemampuan organisasi untuk memecahkan masalah-masalahnya, dan kemampuannya untuk melakukan perubahan-perubahan yang berasal dari lingkungan pendukung utama organisasi akan tercapai, jika pembinaan dan pengembangan individu-individu, kelompok, dan atau seluruh sistem dalam organisasi secara keseluruhan, itulah sebabnya usaha ini merupakan bagian dari ilmu organisasi.

Menurut Thoha (2003;183) kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan yang meliputi organisasi secara keseluruhan dan dikelola dari pucuk pimpinan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang berencana di dalam proses organisasi dengan mempergunakan ilmu perilaku.

Menurut Hendrawan (2001;83) kegiatan pembinaan dalam rangka pengembangan organisasi yang dilakukan menyangkut dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal pokok tersebut adalah penyangkut pengembangan dan pelebagaan organisasi dalam menjalankan usaha organisasi.

Fred (2004;65) secara lebih jelas menyatakan bahwa upaya pembinaan dalam rangka pengembangan organisasi dalam konteks kekinian harus mengacu pada beberapa persyaratan pokok, yakni tindakan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan swadaya organisasi dalam rangka menjalankan organisasi pada jenis nirbala untuk mencegah ketergantungan dalam aktualitas organisasi, pengarahan organisasi untuk menjalin kemitraan dalam jaring organisasi secara terpadu, baik dalam wujud kerja sama program maupun kerja sama pemikiran melalui kegiatan *Brainstroming* semua pihak yang bersentuhan dengan kegiatan ini. Pembinaan organisasi tidak terpisahkan dari partisipasi semua pihak, bersangkutan. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan strategis untuk menciptakan organisasi melakukan usahanya secara efektif dan efisien.

Sementara itu untuk terlaksananya suatu pembinaan maka Ndraha (2001;168) mengatakan melalui:

- A. Pendidikan;
- B. Latihan (penataran, unpreading, kursus, dan sebagainya);
- C. Lokalkarya (*workshop*);
- D. Bimbingan lapangan (penyuluhan, laboratorium, dan sebagainya);
- E. Penerangan;
- F. Pertemuan, diskusi, musyawarah;
- G. Pers, radio, dan TV;
- H. Intruksi-intruksi.

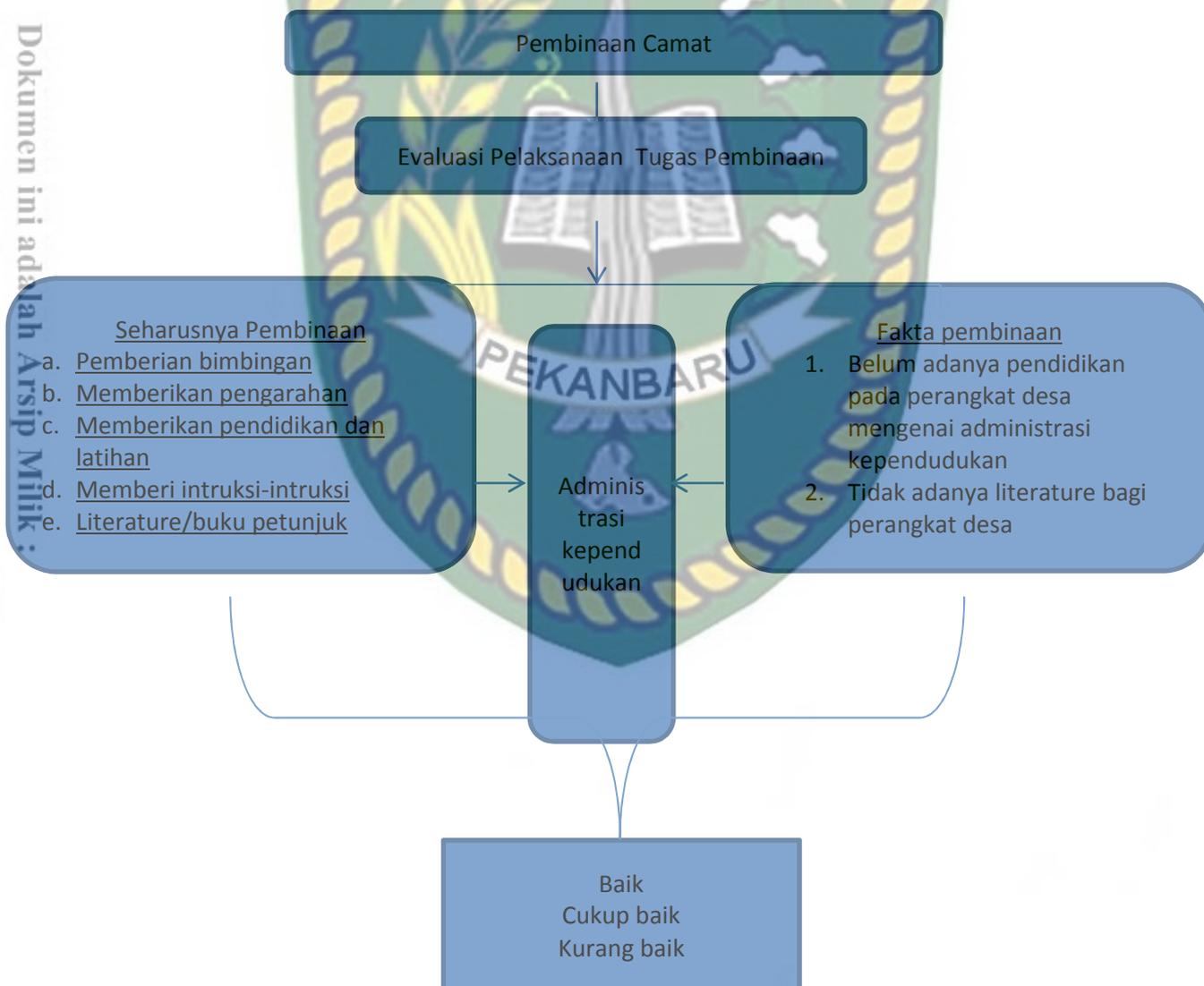
Pembinaan menurut Santoso adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi (dalam Nurkhairi,2015;17).

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Sumber : Modifikasi penulis,2018

D. Konsep Operasional

Guna menghindari terjadinya kesalahan penafsiran tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan penulis operasionalkan beberapa konsep antara lain :

1. Administrasi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok manusia berdasarkan pembagian kerjasama sebagaimana yang ditentukan dalam struktur dengan pendayagunaan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
2. Kecamatan adalah wilayah kerja camat selaku perangkat daerah kota/kabupaten (UU 32/2004).
3. Evaluasi adalah penilaian program ADD yang dilaksanakan oleh pemerintah desa khususnya dikecamatan rambah dengan melihat input proses hasil dan dampak bagi masyarakat
4. Pembimbingan yang dimaksud adalah pembimbingan dalam tulisan ini adalah usaha-usaha yang dilakukan camat, untuk mengajak dan menggiring, serta mendorong agar lembaga kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
5. Pengarahan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan camat untuk memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing
6. Memberikan pendidikan dan latihan yang dimaksud dengan pendidikan dan latihan adalah kegiatan yang dilakukan camat dalam membekali

anggota atau perangkat kelembagaan melalui pendidikan dan peatihan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

7. Memberi intruksi-intruksi, yang dimaksud dengan memberi intruksi disini adalah usaha-usaha camat untuk memberikan sejumlah perintah untuk dilaksanakan oleh lembaga kemasyarakatan agar tugas dan fungsinya dapat dikerjakan
8. Literature/buku petunjuk yaitu penyimpanan literature atau buku pedoman atau panduan kerja bagi masing-masing anggota kelompok lembaga tau buku pedoman atau panduan kerja bagi masing-masing anggota kelompok lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dibebankan kepadanya.



C. Operasional Variabel

Tabel II.1. Operasional Variable Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Konsep	Variabel	Dimensi	Indikator	Sub Indikator	Ukuran
1	2	3	4	5	6
Menurut Finance (dalam Bajuri dan Yuono, 2012: 136-137) Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh tentang <i>input, process, output, dan outcome</i>	Evaluasi	Pembinaan	1. Pemberian bimbingan	a. Adanya upaya menunjuki b. Adanya upaya mengiring c. Adanya upaya mendorong	Baik Cukup baik Kurang baik
			2. Memberikan pengarahan	a. Pemberian arahan b. Pemberian petunjuk c. Pemberian langkah-langkah	Baik Cukup baik Kurang baik
			3. Memberikan pendidikan dan latihan	a. Adanya pemberian keterampilan b. Adanya pemberian pendidikan c. Adanya pemberian latihan	Baik Cukup baik Kurang baik
			4. Memberi intruksi-intruksi	a. Adanya instruksi lisan b. Adanya instruksi tertulis c. Adanya perintah	Baik Cukup baik Kurang baik
			5. Literature atau buku petunjuk	a. Pemberian literature b. Pemberian prosedur kerja c. Pemberian rincian kerja	Baik Cukup baik Kurang baik

D. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Tugas Camat dalam melakukan pembinaan diberikan pengukuran dengan meakukan kasifikasi penilaian sebagai berikut :

Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan dikatakan :

Baik : Apabila hasil tanggapan responden pada kategori baik

Berada pada rentang persentase 67%-100%

Cukup baik : apabila hasil tanggapan responden pada kategori baik

berada pada rentang persentase 34%-66%

Kurang baik : apabila hasil tanggapan responden pada kategori baik

berada pa rentang persentase 1%-33%

Pembinaan

a. Adanya bimbingan

Dikatakan :

Baik : Apabila Camat telah melakukan pembinaan

Melalui pemberian bimbingan pada lembaga kemasyarakatan yang meliputi mengajak, menunjuk, menggiring serta mendorong orang/perangkat dalam lembaga kemasyarakatan dengan menjalankan tugas-tugas

untuk kepentingan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antar 67%-100%

Cukup baik : apabila camat hanya memberikan 2 dari 3 bentuk pembimbingan kepada lembaga kemasyarakatan untuk menggerakkan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar 34%-66%

Kurang baik : apabila camat hanya memberikan 1 saja atau tidak memberikan bimbingan kepada lembaga kemasyarakatan untuk menggerakkan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar anatar 1%-33%

b. Pemberian pengarahan

Dikatakan :

Baik : apabila camat telah melakukan pembinaan pengarahan pada lembaga kemasyarakatan yang meliputi pemberian arahan, pemberian petunjuk, pemberian langkah-langkah orang/perangkatdaam lembaga kemasyarakatan untuk menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 67%-100%

Cukup baik : apabila camat hanya memberikan pembinaan daam bentuk pengarahan 2 dari 3 kegiatan kepada lembaga kemasyarakatan untuk menggerakkan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 34%-66%

Kurang baik : apabila camat hanya memberi pembinaan daam bentuk pengarahan 1 dari 3 bentuk pengarahan atau tidak ada sama sekali kepada lembaga-lembaga atau rekapitulasi jawaban responden berkisar 1%-33%

c. Pendidikan dan latihan

Dikatakan :

Baik : apabila camat telah melakukan pembinaan pendidikan dan latihan orang/perangkat dalam lembaga kemasyarakatan yang meliputi adanya pemberian keterampilan, adanya pemberian pendidikan, adanya pemberian latihan orang/perangkat dalam lembaga kemasyarakatan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 67%-100%

Cukup baik : apabila camat hanya memberikan pembinaan dalam bentuk pendidikan dan latihan 2 dari 3 kegiatan kepada lembaga kemasyarakatan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 34-66%

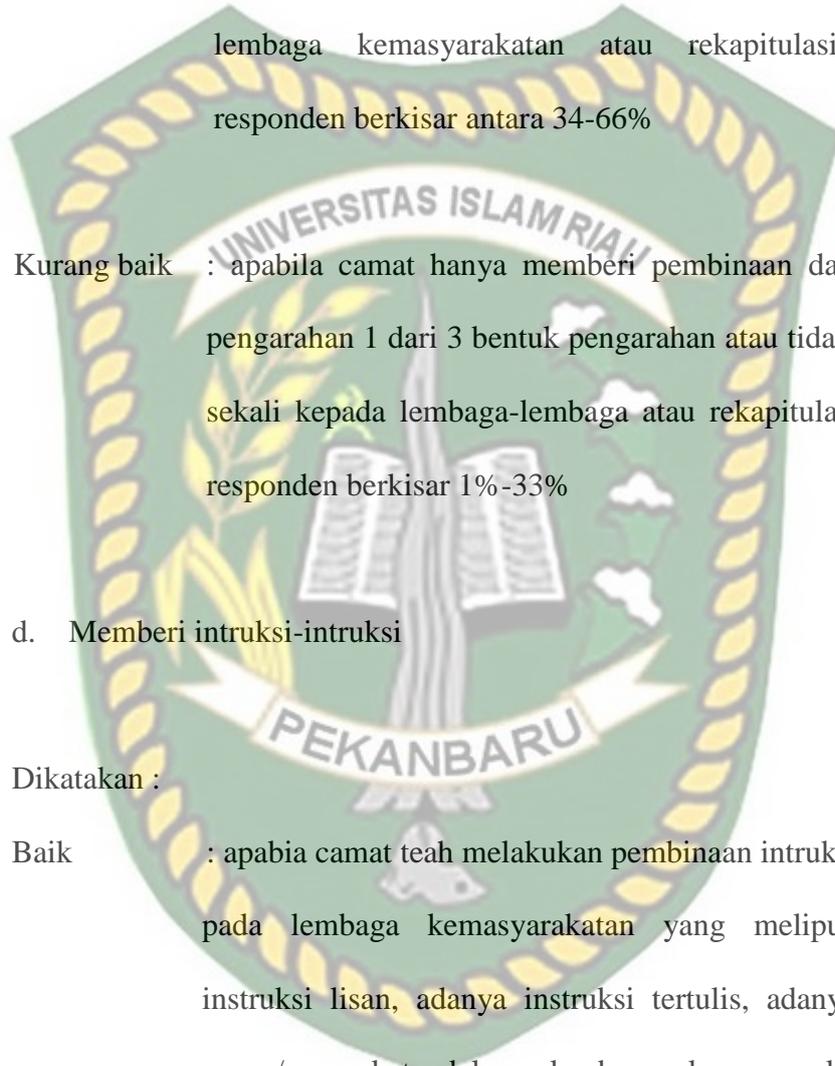
Kurang baik : apabila camat hanya memberi pembinaan dalam bentuk pengarahan 1 dari 3 bentuk pengarahan atau tidak ada sama sekali kepada lembaga-lembaga atau rekapitulasi jawaban responden berkisar 1%-33%

d. Memberi intruksi-intruksi

Dikatakan :

Baik : apabila camat telah melakukan pembinaan intruksi-instruksi pada lembaga kemasyarakatan yang meliputi adanya instruksi lisan, adanya instruksi tertulis, adanya perintah orang/perangkat dalam lembaga kemasyarakatan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 67-100%

Cukup baik : apabila camat hanya memberikan pembinaan dalam bentuk memberi intruksi-intruksi 2 dari 3 kegiatan kepada



lembaga kemasyarakatan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 34-66%

Kurang baik : apa bila Camat hanya memberikan pembinaan dalam bentuk memberi intruksi-intruksi 1 dari 3 kegiatan kepada lembaga kemasyarakatan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 1-33%

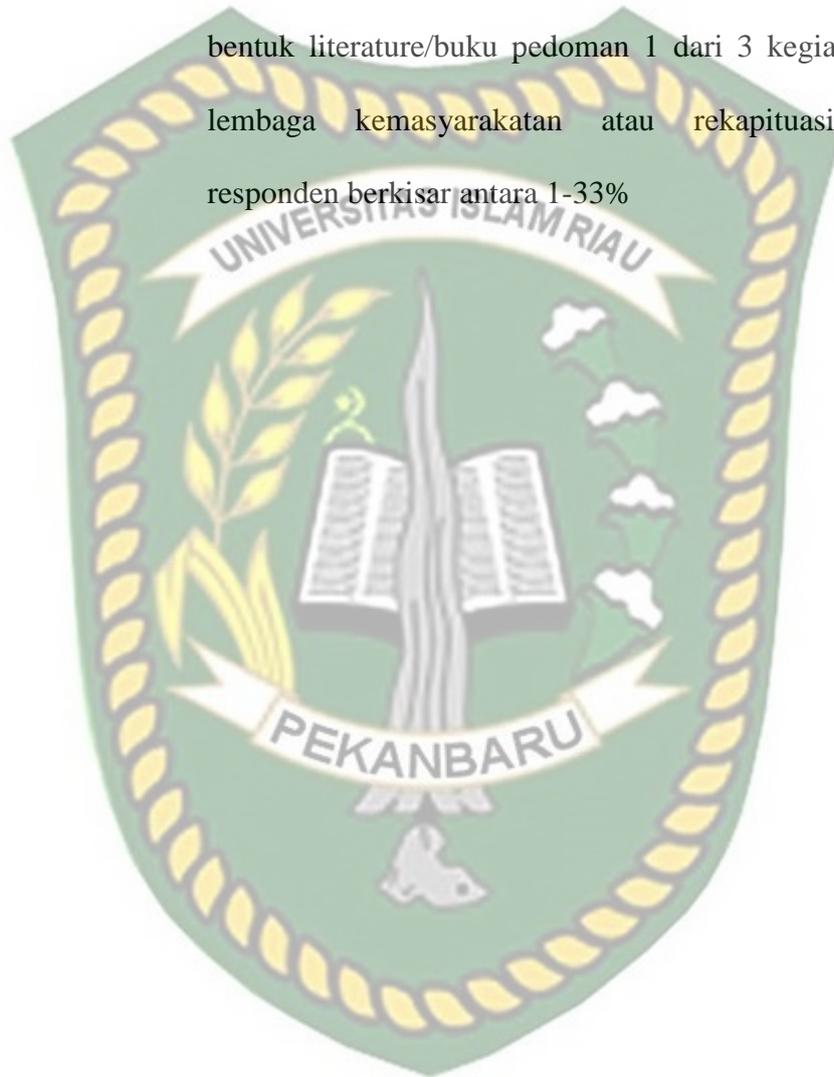
e. Literature/buku pedoman

Dikatakan :

Baik : apabila Camat telah melakukan pembinaan literature atau buku pedoman pada lembaga kemasyarakatan yang meliputi pemberian literature, pemberian prosedur kerja, pemberian rincian kerja orang/perangkat dalam lembaga kemasyarakatan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 67-100%

Cukup baik : apabila Camat hanya memberikan pembinaan dalam bentuk literature/buku pedoman 2 dari 3 kegiatan kepada lembaga kemasyarakatan atau rekapitulasi jawaban berkisar antara 34-66%

Kurang baik : apabila camat hanya memberikan pembinaan dalam bentuk literature/buku pedoman 1 dari 3 kegiatan kepada lembaga kemasyarakatan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 1-33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan survey deskriptif yaitu penelitian dengan maksud untuk melakukan pengukuran secara cermat dan komprehensif terhadap suatu fenomena sosial, kemudian peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun data. Selanjutnya pada penelitian lapangan menggunakan kuessioner guna menghimpun data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dengan alasan Koordinasi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan terhadap perangkat desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sejauh ini masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dimana kurangnya kedisipinan perangkat desa daam bekerja.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2003:90). Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua petugas camat di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 20 orang dan semua desa yang berjumlah

13 desa 1 kelurahan dengan populasi 135 aparat sehingga jumlah sampelnya 22 orang.

Menurut Sugiyono (2011:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

2. Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam satu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Yang menjadi responden yaitu semua semua aparat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 2 orang dan aparat desa diambil sampel sebanyak 23 orang.

Tabel III.1 : Distribusi Pegawai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan Perangkat Desa

No.	ASN Kecamatan	Jumlah Populasi	Ukuran sampel		Persentase
			Perhitungan	Jumlah Sampel	
1	2	3	4	5	6
1	Camat	1	$(9/115) \times 4 \%$	1	4%
2	Sekretaris Kecamatan	1	$(131/115) \times 4 \%$	1	4%
3	Kepala Seksi	4	$(33/115) \times 16 \%$	4	17%
4	Pegawai Kantor Kecamatan	19	$(1/115) \times 8 \%$	2	8%
5	Perangkat Desa	90	$(1/115) \times 66 \%$	15	67%
Jumlah		115		23	100%

Sumber : Kantor Camat Rambah Tahun 2018

D. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam hal penarikan sampel, baik responden maupun informan, penulis menggunakan teknik sensus yaitu seuruh populasi dijadikan sampel dengan alasan jumlahnya yang sedikit sedangkan untuk kepala desa dan staffnya.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa identitas responden berupa jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan/pangkat dan ruang, dan umur serta hasil tanggapan responden mengenai pembinaan yaitu pemberian bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan dan latihan, memberi intruksi-intruksi, literature/buku petunjuk.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh melalui buku, dokumen dan data yang telah tersedia di Kecamatan Rambah serta berkaitan dengan masalah penelitian dan dianggap perlu, sedangkan dari perpustakaan untuk mendapatkan teori-teori tertentu yang relevan dengan permasalahan peneitian tersebut termasuk Undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lokasi dengan mengambil data kondisi pelaksanaan tugas camat
2. Kuesioner yaitu pengambilan data dengan penyebaran daftar pertanyaan, berdasarkan indikator yang ada, dengan jalan memberikan terlebih dahulu pada kepala seksi pemerintahan untuk memberikan pada setiap pihak yang dianggap perlu menjawab pertanyaan ini sesuai dengan sampel yang ada, setelah dua hari penulis mengambil kuis yang telah disebarakan tersebut

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dalam hal ini diuraikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya diuraikan sesuai dengan identitas responden masing-masing serta indikator variabel. Penelitian ini menggunakan teknik kuantitatif secara deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpul data, setelah data terkumpul dikelompokkan atau dikasifikasikan melalui kuisioner menurut jenisnya lalu disusun dan kemudian diolah kedalam tabel, setelah itu diuraikan dan kemudian diberikan pembahasan sekaligus pengujian hipotesis

2. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Penelitian ini dimulai bulan februari 2018 dan direncanakan akan selesai pada bulan oktober 2018. Untuk lebih jelasnya jadwal waktu kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III.2. Jadwal Waktu penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Keterangan	Tahun 2018/2019 Bulan/Minggu															
	Sept-okt				november				desember				januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengusulan Proposal	X	X	X	X												
Perbaikan Proposal			X	X												
Seminar Proposal				X	X	X										
Perbaikan Proposal						X	X									
Proses Administrasi							X	X	X							
Penyebaran Quissioner								X	X	X	X	X				
Pengumpulan Data											X	X				
Pengolahan Data											X	X	X			
Konsultasi											X	X	X			
Pengajuan/perbaikan Skripsi											X	X	X			
Komprehensif											X	X	X	X	X	X

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Kecamatan Rambah merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu dan dalam pemerintahan Kabupaten Kampar namun dengan bertambahnya Penduduk dan seiringnya waktu timbullah niat dari para tokoh negeri ini untuk memisahkan diri dari Kabupaten Kampar dan menjadi sebuah Kabupaten yang berdiri sendiri yaitu Kabupaten Rokan Hulu.

Setelah Kabupaten Rokan Hulu di sahkan menjadi salah satu Kabupaten di Propinsi Riau pada tahun 1999 maka Kecamatan Rambah termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu dan Pada Tahun 2003 Kecamatan Rambah dimekarkan menjadi 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Rambah samo, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Bangun Purba, dan Kecamatan Rambah itu sendiri.

Semenjak sebagai institusi eksekutif yang berperan menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat merupakan perpajakan tangan dari pemerintah otonomi Kabupaten Rokan Hulu ini merupakan aspirasi masyarakat yang bermanfaat untuk mempermudah masyarakat dalam hal pelaksanaan kepengurusan administrasi serta lebih mempercepat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan memotong rentang kendali pelayanan administrasi pemerintah, pembangunan sehingga memudahkan Masyarakat untuk berurusan sehingga tidak perlu jauh-jauh ke Kabupaten.

Adapun luas Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu adalah +3394,65 km², dengan iklim tropis suhu antara 22-31°C dan terdapat dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau pada umumnya terjadi antara bulan maret sampai dengan agustus sedangkan musim hujan terjadi bulan September sampai dengan januari . sebagian besar merupakan daratan rendah dengan luas 6.332,57 Km (85%) dan perbukitan seluas 1.1117,48 Km (15%) berada sepanjang kaki bukit barisan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat dengan ketinggian berkisar 3300-500 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk. Ibu kot Roka Hulu adalah Pasir Pangaraian.

Selain itu terdapat 13 desa daan 1 kelurahan di dalam kecamatan Rambah antara lain:

1. Pasir pangaraian
2. Rambah tengah utara
3. Rambah tengah hilir
4. Rambah tengah hulu
5. Rambah tengah barat
6. Menaming
7. Pasir baru
8. Sialang jaya
9. Tanjung belit

10. Babussalam
11. Pematang beraangan
12. Suka maju
13. Koto tinggi
14. Pasir maju

Berdasarkan statistik tahun 2011 di wilayah Kecamatan Rambah memiliki penduduk sebanyak 41.000 jiwa yang terdiri dari perempuan 20.801 jiwa dan laki-laki sebanyak 19.652 Jiwa.

Adapun batas wilayah kecamatan Rambah adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecaamatan Bangun Purba
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Rokan IV Koto
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rambah Samo

A. Keadaan Demografis

Keadaan pegawai berdasarkan Jumlah pegawai, Jenis kelamin pegawai, pengembangan karier pegawai, masa kerja pegawai Kantor Camat Rambah.

1. Jenis kelamin

Jenis kelamin dalam suatu organisasi bisa berbeda-beda jumlahnya antara satu sama lainnya hal ini di tentukan oleh banyaknya laki-laki dan perempuan yang ada di organisasi tersebut.

Pegawai Pada Kantor Camat Rambah sangat mendukung kerja yang ada maka selanjutnya dapat dilihat jumlah pegawai seperti berikut :

Tabel 4.1: Keadaan Pegawai Kantor Camat Rambah Menurut jumlah pegawai

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Laki-laki	14	60%
2.	Perempuan	9	39%
	T o t a l J u m l a h	23	100%

Sumber Data :Kantor Camat Rambah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Kantor Camat Rambah mempunyai berjenis kelamin laki-laki 14 orang (60%), namun demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kalaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Camat Rambah sehingga dinas ini dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi, maka dengan demikian dapat diketahui bahwa dengan jumlah laki-laki yang dominan dalam organisasi maka setiap tugas dapat di jalankan dengan secara optimal.

2. Masa Kerja

Masa kerja bagi setiap pegawai sangat mendukung hasil kerja yang dilakukannya maka dari itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden mengenai masa kerja yang selengkapanya disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.2: Keadaan Pegawai Kantor Camat Rambah Menurut Masa Kerja

No.	Masa kerja	Jumlah	Persentase
1.	0 - 5	1	4%
2.	5 - 10	1	4%
3.	10 - 15	6	26%
4.	15 - 20	4	18%
5.	20 - 25	6	26%
6.	>25	5	22%
	Total Jumlah	23	100%

Sumber Data :Kantor Camat Rambah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Kantor Camat Rambah mempunyai masa kerja di bawah lima tahun, atau pada umumnya tergolong pegawai baru, namun demikian terdapat juga pegawai juga sudah senior atau telah lama mengabdikan. Kolaborasi antara pegawai tua dan muda demikian ini sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Camat Rambah, sehingga dapat bekerja lebih baik dan maksimal lagi, dan dengan melihat hal tersebut maka kinerja Kantor Camat Rambah dapat semakin baik karena masa kerja pegawai juga sudah baik.

3. Pengembangan Karier

Setiap organisasi pasti memerlukan orang-orang yang mempunyai pengembangan karier yang memadai karena dengan pengembangan karier yang baik maka organisasi tersebut dapat berjalan dengan optimal.

Keadaan Pegawai Kantor Camat Rambah Berdasarkan Pengembangan karier adalah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3 : Keadaan Pegawai Kantor Camat Rambah Menurut Pengembangan karier.

No.	Tingkat pengembangan karier	Jumlah	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	D3	6	26%
2.	S1	5	22%
3.	S2	12	52%
	T o t a l J u m l a h	23	100%

Sumber Data :Kantor Camat Rambah, 2018

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pengembangan karier yang paling banyak adalah Sarjana yang berjumlah 12 orang atau 52% maka dengan demikian setiap pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik dan dapat diselesaikan dengan sempurna

4. Pangkat

Masa kerja bagi setiap pegawai sangat mendukung hasil kerja yang dilakukannya maka dari itu untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden mengenai masa kerja yang selengkapny disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.4: Keadaan Pegawai Kantor Camat Rambah Menurut Pangkat

No.	Pangkat / Golongan	Jumlah	Persentase
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	III a – III d	6	26%
2.	II a – II d	5	22%
3.	I a – I d	12	52%
	T o t a l J u m l a h	23	100%

Sumber Data :Kantor Camat Rambah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Kantor Camat Rambah mempunyai pangkat III a-III d, atau pada umumnya tergolong pegawai baru, namun demikian, melihat hal tersebut maka kinerja Kantor Camat Rambah dapat semakin baik karena masa kerja pegawai juga sudah baik.

5. Umur

Umur/usia setiap pegawai sangat mendukung untuk ketenangan dan kesabaran dalam melaksanakan pekerjaan. Usia pegawai Kecamatan Rambah berkisar di atas tiga puluh lima tahun (35) ke atas seperti dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini :

Tabel 4.5. Umur / Usia Keadaan Pegawai Kantor Camat Rambah.

No.	Umur / Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	20 – 25	3	13%
2	25 - 30	3	13%
3	30 - 35	5	22%
4	35 - 40	3	13%
5	40 – 45	3	13%
6	45 – 50	3	13%
7	50 – 56	3	13%
	Total Jumlah	23	100%

Sumber : Kantor Camat Rambah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa umur/usia pegawai di Kantor Camat Rambah sebahagian besar adalah antara 35 tahun hingga 40 tahun hal ini menandakan pegawai dan guru yang ada pada masa produktif untuk bekerja.

D. Tugas dan Fungsi

1. Susunan Organisasi Kecamatan

a. Camat

Mempunyai tugas :

- Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Kelurahan dan desa
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah
- Pembinaan pembangunan masyarakat Kelurahan meliputi pembinaan sarana dan prasarana peekonomian, proksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup
- Pembinaan kesejahteraan sosial
- Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatatusahaan dan rumah tangga

b. Sekretaris Kecamatan

Mempunyai tugas :

- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya
- Merumuskan dan melaksanakan urusan administrasi keuangan

- Merumuskan dan melaksanakan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga

c. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas :

- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan umum dan Kelurahan
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pembinaan kegiatan sosial politik, ideology Negara dan kesatuan bangsa

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas :

- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja

e. Seksi Pembangunan Masyarakat

Mempunyai tugas :

- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan distribusi
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan pembinaan lingkungan hidup

- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pembinaan kegiatan social politik, ideology negara dan kesatuan bangsa

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas :

- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan social, pembinan kepemudaan, peraan wanita dan olahraga
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan melaksanakan penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pengembangan karier, kebudayaan dan kesehatan masyarakat

g. Seksi Pelayanan Umum

Mempunyai tugas :

- Mermuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan embinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi
- Merumuskan dan melaksanakan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum

i. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sangat di butuhkan dalam setiap intansi baik pemerintah karena dengan adanya struktur maka setiap tugas yang ada akan bisa di bagi dan di

jalankan sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Keberadaan struktur organisasi juga bertujuan untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan pertanggungjawaban setiap tugas sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pegawai

Gambar IV.I Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu



Sumber :Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu,2018

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

a. Tingkat Responden

Merupakan cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertujuan akan terciptanya keserasian dalam melakukan pekerjaan untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat tingkat dari pada Aparat Pemerintah pada tabel berikut :

Tabel V.1. Tingkat pendidikan responden di Kecamatan Rambah

No	Tingkat	Jumlah	Persentase
1	SD	2	9%
2	SMP	3	13%
3	SLTA	4	17%
4	D.III	5	22%
5	S.1	9	39%
	Jumlah	23	100%

Sumber, Kecamatan Rambah,2018

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat Aparat pemerintah bervariasi, yaitu yang memiliki paling dominan adalah SLTA yang berjumlah 4 orang atau (17%) dan D.III 5 orang atau (22%) serta yang mempunyai S.1 berjumlah 9 orang atau (39%).

b. Masa Kerja Resonden

Masa kerja bagi seorang pegawai sangat mempengaruhi kinerjanya karena dengan masa kerja yang baik maka tingkat pengalaman yang mereka miliki akan semakin baik pula selanjutnya disini dapat dilihat masa kerja dari aparat Kecamatan Rambah yaitu :

Tabel.V.2. Masa Kerja Responden

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
----	------------	--------	------------

1	1 – 5 Tahun	4	22%
2	6 – 10 Tahun	3	30%
3	11 Tahun keatas	16	48%
	Jumlah	23	100%

Sumber : Kantor Kecamatan Rambah,2018

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa masa kerja dari responden aparat Kecamatan Rambah pada umumnya telah memiliki masa kerja antara 6 – 11 tahun keatas yaitu sebanyak 11 orang.

B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Penyelenggaraan pemerintahan selain bertujuan melaksanakan Perangkat Desa program pembangunan dan pelayanan pada masyarakat disatu sisi ,menjadi tanggung jawab pemerintah namun pada sisi lain sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah membina Perangkat Desa agar masyarakat dan pemerintah saling beganding tangan dalam memikul tanggung jawab dalam mensejahterakan masyarakat.

Masalah sumber daya manusia mendapat perhatian secarta khusus, terutama yang berkaitan dengan kualitas, sikap dan tingkah laku, dengan kualitas dan kinerja yang tinggi maka berbagi potensi yang ada dalam masyarakat dapat di manfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Untuk dapat mencapai tujuan maka bertumpu kepada bagaimana pimpinan dan bawahan dapat bekerja secara baik. Dimana dalam hal ini pihak pimpinan harus mampu memotivasi dalam meningkatkan semangat dan gairah kerja. Seandainya motivasi

dalam meningkatkan semangat dan gairah kerja pegawai tidak sesuai dengan yang diinginkan, tentu saja akan berakibat tidak baik pada perkembangan tugas atau kemajuan organisasi pemerintahan tersebut, kalau saja PNS tidak berkualitas dalam bekerja tentu saja tugas dan tanggung jawab yang diembankan pemerintah akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka melalui dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kecamatan ini pemerintah menetapkan fungsi Camat sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
6. Pembinaan Perangkat Desa

Maka selanjutnya disini akan diuraikan secara terperinci mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu yaitu :

1. Pemberian Bimbingan

Suatu rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri. Hal ini diperlukan bila pembangunan untuk masyarakat maka keinginan masyarakatlah yang harus dijadikan acuan bagi penyusunan berbagai program pembangunan Kecamatan.

Menyadari tingkat pengetahuan masyarakat Kecamatan relatif rendah karena itu pembinaan dari Camat sangat di perlukan terutama melalui pembinaan atau bimbingan bagi lembaga-Perangkat Desa yang ada di Kecamatan.

Sehubungan dengan proses pemberian bimbingan berdasarkan temuan di lapangan Camat Rambah telah melakukannya. Berdasarkan wawancara dengan pihak Kecamatan diperoleh informasi bahwa pemerintah Kecamatan telah memberikan bimbingan berupa petunjuk, kemudian mendorong dan mengiring tujuan dari lembaga-lembaga yang mereka kelola seperti, perangkat desa

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden yang mengelola lembaga-Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Rambah tersebut maka penilaian terhadap jawaban mereka dapat dilihat seperti pada tabel berikut :



Tabel 5.3. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pemberian Bimbingan

Indikator	No	Dimensi	Skala Nilai						Sampel	%	Total Per/Dimensi	Persentase Dimensi (%)
			3		2		1					
			F	%	F	%	F	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PEMBERIAN BIMBINGAN	1	Camat memberi petunjuk pada perangkat Desa	5	30	11	47	7	30	23	100	44	$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$ $\frac{135}{207} \times 100$
	2	Camat memberi petunjuk Mengiring perangkat Desa untuk Tertib dalam Pelaksanaan Tugas	4	17	13	56	6	26	23	100	44	
	3	Camat memberi Dorongan kepada perangkat Desa dalam melaksanakan Tugas	7	30	10	43	6	26	23	100	47	
Total Dimensi			135									65% (Cukup Baik)

Sumber, Olahan penelitian 2018

Dari tanggapan berbagai responden Pegawai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan Perangkat Desa terhadap indikator Pemberian Bimbingan didapati bahwa dimensi untuk *Camat memberi petunjuk pada perangkat Desa* sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 5 orang dengan persentase (30 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 11 orang dengan persentase (47%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 7 orang dengan persentase (30%).

Dimensi *Camat memberi petunjuk Mengiring perangkat Desa untuk Tertib dalam Pelaksanaan Tugas*, sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 4 orang dengan persentase (17 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 13 orang dengan persentase (56%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 6 orang dengan persentase (26%).

Dimensi Camat member Dorongan kepada perangkat Desa dalam melaksanakan Tugas, sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 7 orang dengan persentase (30 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 10 orang dengan persentase (43%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 6 orang dengan persentase (26%).

Dari analisa data tabel 5.3 mengenai distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pemberian Bimbingan didapati secara bersama-sama menunjukkan nilai presentasi 65 % atau berada pada tahapan **Cukup Baik**.

Sebaiknya pemberian bimbingan ini karena Camat telah ada melakukan upaya menunjuki pada Perangkat Desa serta melakukan kegiatan memberikan petunjuk pada lembaga kemasayarakat dalam bekerja, sedangkan yang menyatakan cukup baik bahwa Camat tidak sempat untuk melakukan petunjuk program pada Perangkat Desa secara terus menerus karena Camat masih ada pekerjaan yang lebih penting maka biasanya di serahkan pada sekretaris Camat, sedangkan yang kurang baik di sebabkan Camat telah ada memberikan petunjuk namun petunjuk yang diberikan belum memadai atau optimal karena hanya di lakukan sekali dalam setahun.

2. Memberikan pengarahan

Dalam melakukan pembinaan selain melakukan bimbingan kepada Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Rambah maka seharusnya Camat juga memberikan pengarahan terhadap setiap Perangkat Desa. Hal ini bertujuan agar setiap lembaga yang ada dapat

bekerja secara optimal sehingga beban pembangunan tidak saja di pikul oleh pemerintah Kecamatan tapi juga oleh masyarakat.

Sehubungan dengan proses pemberian pengarahan berdasarkan temuan di lapangan Camat Rambah telah melakukannya. Berdasarkan wawancara dengan pihak Kecamatan diperoleh informasi bahwa pemerintah Kecamatan telah memberikan pengarahan berupa arahan, petunjuk pemberian langkah-langkah, pada Perangkat Desa, yang ada di wilayah lingkungan Kecamatan Rambah, Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden yang mengelola lembaga-Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Rambah apakah mereka mendapat pengarahan dari Camat Rambah jawaban mereka dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel V.4. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Pengarahan

Indikator	No	Dimensi	Skala Nilai						Sampel	%	Total Per/Dimensi	Persentase Dimensi (%)
			3		2		1					
			F	%	F	%	F	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PEMBERIAN PENGARAHAN	1	Camat memberi arahan pada perangkat Desa	6	26	14	60	3	13	23	100	49	$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$ $\frac{151}{207} \times 100$
	2	Camat memberi petunjuk perangkat Desa	8	34	10	43	5	21	23	100	49	
	3	Camat memberi Langkah langkah kepada perangkat Desa	9	39	12	52	2	8	23	100	53	
Total Dimensi			151									73% (Baik)

Sumber, Olahan penelitian 2018

Dari tanggapan berbagai responden Pegawai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan Perangkat Desa terhadap indikator Pemberian Pengarahan didapati bahwa dimensi untuk Camat memberi petunjuk pada perangkat Desa sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 6 orang dengan persentase (26 %),

menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 14 orang dengan persentase (60%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 3 orang dengan persentase (13%).

Dimensi Camat memberi petunjuk Mengiring perangkat Desa untuk Tertib dalam Pelaksanaan Tugas, sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 8 orang dengan persentase (34 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 10 orang dengan persentase (43%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 5 orang dengan persentase (21%).

Dimensi Camat member Dorongan kepada perangkat Desa dalam melaksanakan Tugas, sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 9 orang dengan persentase (39 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 12 orang dengan persentase (52%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 2 orang dengan persentase (8%).

Dari analisa data tabel V.3 mengenai distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pemberian Bimbingan didapati secara bersama-sama menunjukkan nilai presentasi 73 % atau berada pada tahapan **Baik**.

Dari tanggapan berbagai responden pada Perangkat Desa yang ada bahwa pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai pada Perangkat Desa sebanyak 8 orang atau (35%) dikategorikan baik, yang mana pengarahan pada Perangkat Desa dilakukan dengan jalan dalam kegiatan penyusunan jumlah penduduk serta juga meberikan petunjuk dan langkah-langkah pada mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas Perangkat Desa

Selain itu pemberian arahan pada Kaur di Kantor Desa di ketahui bahwa arahan yang di berikan adalah berupa pembuatan surat masuk yang benar dan mengatur setiap surat keluar dengan sesuai tujuan dan penomorannya.

Begitu juga dengan pemberian arahan pada kepala dusun di ketahui bahwa Camat Rambah ada memberikan arahan yang berbentuk penataan lingkungan agar aman dan menaga ketentraman dan ketertiban lingkungan di setiap dusun

Selanjutnya dari 8 orang responden yang terkategori baik tersebut sebanyak 1 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan bahwa Camat Rambah telah memberi pengarahan, petunjuk dan langkah-langkah untuk membuat program-program tugas Perangkat Desa. Kemudian dari 8 orang responden pada Perangkat Desa yang terkategori baik sebanyak 4 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka juga merasakan Camat Rambah telah memberi pengarahan dan petunjuk terutama mengenai cara-cara penyusunan program-program tugas Perangkat Desa tingkat Kecamatan. Sedangkan dari 8 responden yang terkategori baik tersebut sebanyak 8 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka merasakan bahwa Camat Rambah pernah memberi mereka pengarahan dan petunjuk terutama tentang tugas mereka sebagai pimpinan masyarakat dan juga mereka diberi petunjuk, tentang menanggulangi keamanan lingkungan dan pencegahan penyakit masyarakat yang mana pemebrian petunjuk pada Perangkat Desa dilakukan dengan jalan dalam kegiatan petunjuk penyusunan data penduduk serta juga meberikan petunjuk dan langkah-langkah pada mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas Perangkat Desa

Selain itu pemberian petunjuk pada Kaur di Kantor Desa di ketahui di berikan adalah berupa pembuatan surat masuk yang benar dan mengatur setiap surat keluar dengan sesuai tujuan dan penomorannya.

Begitu juga dengan pemberian petunjuk pada kepala dusun di ketahui bahwa Camat Rambah ada memberikan arahan yang berbentuk penataan lingkungan agar aman dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan di setiap dusun

Seiring dengan tanggapan responden diatas juga berdasarkan wawancara penulis dengan Camat Rambah tanggal (13 November 2018) diperoleh informasi bahwa Camat Rambah melakukan pemberian pengarahan dan petunjuk, dan langkah-langkah karena dengan berperannya pada Perangkat Desa itu dengan baik tugas-tugas Camat sebagian akan terbantu oleh Perangkat Desa tersebut.

Selanjutnya dari data tabel 5.4. tersebut juga dapat diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden Perangkat Desa tentang pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai Perangkat Desa, dimana sebanyak 12 orang atau (52%) dikategorikan cukup baik. Dari 12 orang tersebut sebanyak 5 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka menyatakan bahwa Camat Rambah dalam waktu tertentu ada memberikan pengarahan untuk melakukan suatu pekerjaan seperti penyusunan pada Perangkat Desa Kecamatan dan untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang di kembangkan Perangkat Desa.

Selanjutnya dari 23 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 4 orang adalah pengurus Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan bahwa Camat

Rambah kurang dalam memberikan pengarahan untuk membuat program-program kerja hanya di berikan tidak secara berkelanjutan.

Dan dari 23 orang responden pada Perangkat Desa yang terkategori cukup baik sebanyak 5 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka juga mengatakan Camat Raambah kadang-kadang memberikan pengarahan terutama mengenai pada Perangkat Desa, penyusunan program-program tugas Perangkat Desa.

Sementara itu dari 23 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 18 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka merasakan bahwa Camat Rambah sangat jarang dan hampir tidak pernah memberikan pengarahan tentang Perangkat Desa sebagai pimpinan masyarakat terutama dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan sosial.

Dari tanggapan berbagai responden Perangkat Desa yang ada bahwa memberikan pengarahan yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai Perangkat Desa sebanyak 13 orang atau (20%) dikategorikan kurang baik. Dari 13 orang tersebut sebanyak 1 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka menyatakan bahwa Camat Rambah tidak ada memberikan pengarahan dalam menjalankan dan melakukan suatu kegiatan seperti dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Kemudian sebanyak 2 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan bahwa Camat Rambah tidak pernah memberikan pengarahan untuk membuat dan menyusun program-program kerja yang dilakukan setiap tahunnya, yang mana pemberian langkah-langkah pada Perangkat Desa dilakukan dengan jalan dalam

kegiatan petunjuk penyusunan data penduduk serta juga memberikan petunjuk dan langkah-langkah pada mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas Perangkat Desa

Selain itu pemberian langkah-langkah pada Kaur di Kantor Desa di ketahui di berikan adalah berupa pembuatan surat masuk yang benar dan mengatur setiap surat keluar dengan sesuai tujuan dan penomorannya.

Begitu juga dengan pemberian langkah-langkah pada kepala dusun di ketahui bahwa Camat Rambah ada memberikan arahan yang berbentuk penataan lingkungan agar aman dan menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungan di setiap dusun

3. Memberikan Pendidikan dan latihan

Masalah Sumber Daya Manusia mendapatkan perhatian secara.Khusus, terutama yang berkaitan dengan kualitas, sikap dan tingkah laku.Dengan kualitas dan kinerja yang tinggi maka profesionalisme dapat ditingkatkan selanjutnya tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dapat dilaksPerangkat Desa secara efisien dan efektif.

Masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas.Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan sutau bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan, mental).

Untuk menentukan siapa yang melakukan penilaian dalam proses pengukuran Kinerja merupakan masalah dalam proses penilaian Kinerja. Karena penetapan

penilaian ini erat sekali hubungannya dengan persoalan apakah hasil penelitian objektif atau tidak. Penilaian memang penting bagi pencapaian tujuan tugas-tugas pekerjaan pengembangan individu dalam kelompok kerja, dan penting bagi segala bentuk program peningkatan kerja melalui pelatihan dan penyuluhan. dan pelatihan dalam suatu organisasi sebagai salah satu upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, merupakan suatu siklus yang harus dilakukan secara terus menerus. Karena organisasi harus berkembang, untuk mengantisipasi perubahan diluar organisasi, untuk itu maka kemampuan sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan kemajuan dan perkembangan organisasi, maka dari itu dapat dilihat disini fungsi dari Camat dalam melakukan pembinaan yang dilihat dari indikator memberikan pelatihan dan yang terdiri dari :

1. Adanya pemberian ketrampilan
2. Adanya pemberian
3. Adanya pemberian latihan

Dari informasi yang diperoleh maka dapat dilihat tanggapan responden yang terdiri dari berbagai Perangkat Desa, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.5. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Pendidikan dan Latihan

Indikator	No	Dimensi	Skala Nilai						Sampel	%	Total Per/Dimensi	Persentase Dimensi (%)
			3		2		1					
			F	%	F	%	F	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PEMBERIAN PENDIDIKAN DAN	1	Camat memberi keterampilan pada perangkat Desa	6	21	12	52	5	26	23	100	47	

LATIHAN	2	Camat memberi Pendidikan pada perangkat Desa	9	39	11	47	3	13	23	100	52	$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$ $\frac{153}{207} \times 100$
	3	Camat memberi Latihan kepada perangkat Desa Mengelola Administrasi Kependudukan	10	43	11	47	2	8	23	100	54	
Total Dimensi			153									74% (Baik)

Sumber, Olahan penelitian 2018

Dari tanggapan berbagai responden Pegawai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan Perangkat Desa terhadap indikator Pemberian Pendidikan dan Latihan didapati bahwa dimensi untuk Camat memberi petunjuk pada perangkat Desa sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 6 orang dengan persentase (21 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 12 orang dengan persentase (52%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 5 orang dengan persentase (26%).

Dimensi Camat memberi petunjuk Mengiring perangkat Desa untuk Tertib dalam Pelaksanaan Tugas, sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 9 orang dengan persentase (39 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 11 orang dengan persentase (47%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 3 orang dengan persentase (13%).

Dimensi Camat member Dorongan kepada perangkat Desa dalam melaksanakan Tugas, sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 10 orang dengan persentase (43 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 11 orang dengan persentase (47%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 2 orang dengan persentase (8%).

Dari analisa data tabel V.3 mengenai distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pemberian Bimbingan didapati secara bersama-sama menunjukkan nilai presentasi 74 % atau berada pada tahapan **Baik**.

Berdasarkan tanggapan berbagai responden dari pada Perangkat Desa yang ada bahwa Memberikan pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai Perangkat Desa sebanyak 8 orang atau (35%) dikategorikan baik, adapun pendidikan yang di berikan adalah berbentuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi seperti mengambil S.2 sedangkan pelatihan yang di lakukan adalah dengan mengikuti kegiatan seminar dan lokakarya yang dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan Dari 8 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka menyatakan bahwa Camat Rambah telah Memberikan dan latihan dalam bekerja seperti Diklat mengenai kepemimpinan dan Diklat Administrasi. Kemudian dari 8 orang responden yang terkategori baik sebanyak 2 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan bahwa Camat Rambah telah Memberikan dan latihan pada mereka untuk membuat program-program kerja dan melakukan setiap pekerjaan yang ada.

Selanjutnya dari 8 orang responden pada Perangkat Desa yang terkategori baik sebanyak 2 orang adalah PerangkatDesa dimana mereka juga merasakan Camat Rambah telah Memberikan dan latihan terutama mengenai setiap pada Perangkat Desa, penyusunan program kerja.

Sementara itu dari 8 orang responden yang terkategori baik sebanyak 8 orang adalah Perangkat Desa dimana Camat Rambah pernah memberi mereka Memberikan

dan latihan sebagai pimpinan, yang merupakan sebagai kaki tangan pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah kepada masyarakat.

Seiring dengan tanggapan responden diatas juga berdasarkan wawancara penulis dengan Camat Rambah tanggal (13 November 2018) diperoleh informasi bahwa Camat Rambah Memberikan dan latihan kepada Perangkat Desa itu dengan baik tugas-tugas Camat yang mana sebagian akan terbantu oleh pada Perangkat Desa yang ada.

Selanjutnya juga diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden Perangkat Desa yang ada bahwa Memberikan dan latihan yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai Perangkat Desa sebanyak 11 orang atau (48%) dikategorikan cukup baik. Dari 48 orang tersebut sebanyak 5 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka menyatakan bahwa Camat Rambah hanya dalam waktu tertentu Memberikan dan latihan mengenai suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan administrasi Kecamatan. Selanjutnya dari 11 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 4 orang adalah pengurus Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan bahwa Camat Rambah kurang dalam Memberikan dan latihan pada mereka yang bertujuan untuk melakukan setiap kegiatan organisasi yang ada agar berjalan dengan sebaik mungkin.

Selanjutnya dari 11 orang responden pengurus Perangkat Desa yang terkategori cukup baik sebanyak 1 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka juga merasakan Camat Rambah sangat jarang Memberikan dan latihan mengenai kegiatan Perangkat Desa, serta mengenai penyusunan dan pembuatan program-program kerja Perangkat Desa.

Sementara itu dari 11 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 1 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka merasakan bahwa Camat Rambah hampir tidak pernah Memberikan dan latihan terutama tentang bagaimana cara menghadapi masyarakat yang sangat beraneka ragam jenisnya serta mengenai diklat kepemimpinan.

Dari tanggapan berbagai responden pada Perangkat Desa yang ada bahwa Memberikan dan latihan yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai Perangkat Desa sebanyak 4 orang atau (17%) dikategorikan kurang baik dari 4 orang tersebut sebanyak 1 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka menyatakan bahwa Camat Rambah tidak ada Memberikan dan latihan pada mereka dalam menjalankan dan melakukan suatu kegiatan.

Selanjutnya dari 4 orang responden yang terkategori kurang baik sebanyak 1 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan Camat Rambah tidak pernah Memberikan dan latihan pada mereka mengenai pembuatan program-program kerja yang benar dan baik.

Dan selanjutnya 4 orang responden pengurus Perangkat Desa yang terkategori baik sebanyak 1 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan Camat Rambah tidak pernah Memberikan dan latihan mengenai pada Perangkat Desa, terutama dalam hal mengenai bagaiman meningkatkan keamanan dan ketertiban yang ada di Kecamatan Rambah.

4. Memberi intruksi-intruksi

Pembangunan Kecamatan harus dilaksanakan oleh Perangkat Desa secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan Kecamatan akan terus

dilaksanakan Perangkat Desa dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh Kecamatan yang bersangkutan, terutamanya yang menyangkut potensi manusiannya dan daya dukung alamnya. Salah satu kegiatan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Kecamatan ini adalah dengan adanya peraturan yang bisa mengatur dan sebagai acuan kegiatan dari pemerintah Kecamatan.

Guna menjalankan setiap kegiatan yang ada serta guna meningkatkan pembangunan yang ada di Kecamatan maka perlunya adanya peranan dari pimpinan dari Kecamatan dalam memberikan instruksi guna memperlancar setiap pembangunan yang dilakukan yang dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain :

- Adanya instruksi lisan
- Adanya instruksi tertulis
- Adanya perintah

Maka dari itu sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan maka selanjutnya dapat dilihat tanggapan responden yang terdiri dari Perangkat Desa yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel V.6. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Pemberian Instruksi Instruksi

Indikator	No	Dimensi	Skala Nilai						Sampel	%	Total Per/Dimensi	Persentase Dimensi (%)
			3		2		1					
			F	%	F	%	F	%				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PEMBERIAN INSTRUKSI-INSTRUKSI	1	Camat memberi Instruksi Lisan pada perangkat Desa	9	39	10	43	4	17	23	100	51	$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Tertinggi}} \times 100$ $\frac{151}{100} \times 100$
	2	Camat memberi Perintah Untuk	8	34	11	47	4	17	23	100	50	

	Menjalankan Administrasi Kependudukan												207
3	Adanya Perintah	8	34	11	47	4	17	23	100	50			
Total Dimensi		151										73% (Baik)	

Sumber, Olahan penelitian 2018

Dari tanggapan berbagai responden Pegawai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan Perangkat Desa terhadap indikator Pemberian Instruksi-instruksi didapati bahwa dimensi untuk Camat memberi petunjuk pada perangkat Desa sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 9 orang dengan persentase (39 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 10 orang dengan persentase (43%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 4 orang dengan persentase (17%).

Dimensi Camat memberi petunjuk Mengiring perangkat Desa untuk Tertib dalam Pelaksanaan Tugas, sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 8 orang dengan persentase (34 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 11 orang dengan persentase (47%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 4 orang dengan persentase (17%).

Dimensi Camat member Dorongan kepada perangkat Desa dalam melaksanakan Tugas, sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 8 orang dengan persentase (34 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 11 orang dengan persentase (47%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 4 orang dengan persentase (17%).

Dari analisa data tabel V.3 mengenai distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pemberian Bimbingan didapati secara bersama-sama menunjukkan nilai presentasi 73 % atau berada pada tahapan **Baik**.

Dengan melihat tanggapan berbagai responden Perangkat Desa yang ada bahwa Memberi intruksi-intruksi yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai Perangkat Desa dilakukan dengan memberikan instruksi secara langsung pada perangkat selain itu uga telah adanya instruksi secara tertulis seperti surat pengantar untuk melakukan suatu kegiatan oleh perangkat desa dan sebanyak 8 orang atau (25%) dikategorikan baik dari 8 orang tersebut, sebanyak 2 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka menyatakan bahwa Camat Rambah telah Memberi intruksi-intruksi pada dalam bekerja Kecamatan serta juga mendorong serta menggerakkan mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas Perangkat Desa.

Selanjutnya dari 8 orang responden yang terkategori baik sebanyak 2 orang adalah pengurus Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan bahwa Camat Rambah telah Memberi intruksi-intruksi pada mereka untuk membuat program-program kerja yang disusun setiap tahunnya.

Kemudian dari 8 orang responden pengurus Perangkat Desa yang terkategorikan baik sebanyak 2 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka juga merasakan Camat Rambah telah Memberi intruksi-intruksi terutama tentang pengembangan Perangkat Desa, penyusunan program-program kerja untuk selalu aktif membina warga.

Sementara itu dari 8 orang responden yang terkategori baik sebanyak 3 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka merasakan bahwa Camat Rambah pernah Memberi intruksi-intruksi terutama tentang kedudukan mereka sebagai pimpinan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.

Seiring dengan tanggapan responden diatas juga berdasarkan wawancara penulis dengan Camat Rambah tanggal (13 November 2011) diperoleh informasi bahwa Camat Rambah Memberi intruksi-intruksi karena dengan adanya instruksi kepada Perangkat Desa itu dengan baik maka tugas-tugas Camat sebagian akan terbantu oleh Perangkat Desa Perangkat Desa tersebut.

Selanjutnya juga diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden Perangkat Desa yang ada bahwa pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai Perangkat Desa sebanyak 10 orang atau (43%) dikategorikan cukup baik dari 10 orang tersebut sebanyak 5 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka menyatakan bahwa Camat Rambah kadang-kadang dalam waktu tertentu ada Memberi intruksi-intruksi dalam melakukan suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan suatu kebijakan Kecamatan.

Selanjutnya dari 10 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 2 orang adalah pengurus Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan bahwa Camat Logas Tanah Darat kurang dalam Memberi intruksi-intruksi kepada mereka untuk membuat program-program kerja, setiap bulannya bahwa program kerja tahunan.

Selanjutnya dari 10 orang responden pengurus Perangkat Desa Perangkat Desa yang terkategori cukup baik sebanyak 1 orang adalah anggota Perangkat Desa

dimana mereka juga merasakan Camat Logas Tanah Darat kadang-kadang saja Memberi intruksi-intruksi terutama mengenai kegiatan Perangkat Desa, dan penyusunan program-program kerja Perangkat Desa.

Sementara itu dari 10 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 1 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka merasakan bahwa Camat Rambah sangat jarang dan hampir tidak pernah Memberi intruksi-intruksi terutama tentang kedudukan Perangkat Desa sebagai pimpinan masyarakat.

Dari tanggapan berbagai responden Perangkat Desa yang ada bahwa Memberi intruksi-intruksi yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai Perangkat Desa sebanyak 5 orang atau (22%) dikategorikan kurang baik dari 5 orang tersebut sebanyak 1 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka menyatakan bahwa Camat Rambah tidak ada Memberi intruksi-intruksi pada mereka dalam menjalankan dan melakukan suatu kegiatan seperti dalam penyusunan anggaran Kecamatan.

Selanjutnya dari 5 orang responden yang terkategori kurang baik sebanyak 1 orang adalah pengurus Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan bahwa Camat Rambah tidak pernah Memberi intruksi-intruksi mereka untuk membuat program-program kerja.

Selanjutnya dari 5 orang responden pengurus Perangkat Desa yang terkategori baik sebanyak 1 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka juga merasakan Camat Rambah tidak pernah Memberi intruksi-intruksi mengenai kegiatan Perangkat Desa, penyusunan program-program kerja . Sementara itu dari 5

orang responden yang terkategori kurang baik sebanyak 1 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka merasakan bahwa Camat Rambah tidak pernah Memberi intruksi-intruksi pada mereka terutama mengenai kedudukan mereka sebagai pimpinan masyarakat . dari hasil wawancara dengan RT/RW diketahui bahwa Camat Rambah kadang-kadang dalam waktu tertentu ada Memberi intruksi-intruksi dalam melakukan suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan suatu kebijakan Kecamatan.

Dari analisa data tabel 5.6 diatas serta hasil wawancara dengan Camat serta perangkat Kecamatan Rambah dapat disimpulkan bahwa memberi instruksi-instruksi terhadap lembaga organisasi kemasyarakatan di Kecamatan Rambah dapat di kategorikan “Cukup Baik” atau pada persentase 34%-66%.

5. Literatur / buku petunjuk

Buku petunjuk bagi setiap organisasi maupun perorangan sangat diperlukan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan Perangkat Desa setiap tugas yang akan dilakukan karena dengan adanya buku petunjuk dari pimpinan ataupun seseorang yang yang berkompeten dalam wilayah kerjanya maka setiap pekerjaan ataupun kinerja dari organisasi tersebut akan dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin. Dalam hal ini literatur atau buku petunjuk dari luarah untuk dapat diberikan pada pengurus-pengurus lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti :

- pemberian literatur
- pemberian prosedur kerja
- pemberian rincian kerja

Selanjutnya berdasarkan informasi yang di peroleh dari responden tentang ada atau tidak pemberian literatur / buku petunjuk pada Perangkat Desa dalam rangka memperlancar tugas-tugas mereka dalam Kecamatan Rambah, tanggapan mereka dapat di lihat seperti data table berikut ini :

Tabel 5.7. Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Literatur

Indikator	No	Dimensi	Skala Nilai						Sam pel	%	Total Per/Di mensi	Persentase Dimensi (%)
			3		2		1					
			F	%	F	%	F	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
LITERATUR	1	Camat memberi buku petunjuk pada perangkat Desa	6	26	9	39	8	34	23	100	44	$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Skor}}{\text{Skor Teringgi}} \times 100$ $\frac{140}{207} \times 100$
	2	Camat memberi Prosedur Kerja tentang menjalankan administrasi kependudukan	9	39	8	34	6	26	23	100	49	
	3	Camat memberikan rincian kerja tentang menjalankan administrasi kependudukan	7	30	10	43	6	26	23	100	47	
Total Dimensi			140									68% (Baik)

Sumber, Olahan penelitian 2018

Dari tanggapan berbagai responden Pegawai Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dan Perangkat Desa terhadap indikator literature didapati bahwa dimensi untuk Camat memberi petunjuk pada perangkat Desa sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 6 orang dengan persentase (26 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 9 orang dengan persentase (39%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 8 orang dengan persentase (34%).

Dimensi Camat memberi petunjuk Mengiring perangkat Desa untuk Tertib dalam Pelaksanaan Tugas, sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik

sebanyak 9 orang dengan persentase (39 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 8 orang dengan persentase (34%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 6 orang dengan persentase (26%).

Dimensi Camat member Dorongan kepada perangkat Desa dalam melaksanakan Tugas, sebaran distribusi yang menjawab dengan skala tiga (3) Baik sebanyak 7 orang dengan persentase (30 %), menjawab skala dua (2) Cukup Baik sebanyak 10 orang dengan persentase (43%) dan menjawab skala satu (1) Kurang Baik sebanyak 6 orang dengan persentase (26%).

Dari analisa data tabel V.3 mengenai distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Terhadap Indikator Pemberian Bimbingan didapati secara bersama-sama menunjukkan nilai presentasi 68 % atau berada pada tahapan **Baik**.

Dari tanggapan berbagai responden Perangkat Desa Perangkat Desa yang ada bahwa pemberian literatur yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai Perangkat Desa sebanyak 7 orang atau (31%) dikategorikan baik karena telah ada literatur untuk menjalankan kegiatan bagi perangkat desa yaitu sebagai buku petunjuk kegiatan agar tidak melangat setiap program yang ada dan prosedur yang di buat oleh camat bagi perangkat desa adalah berupa teknis kegiatan bagi setiap perangkat desa untuk mengetahui langkah-langkah yang harus di ambil dan di jalankan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan dari 23 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka menyatakan bahwa Camat Rambah telah memberikan literatur / buku petunjuk pada mereka dalam bekerja dan pengambilan suatu keputusan.

Selanjutnya dari 23 orang responden yang terkategori baik sebanyak 2 orang adalah pengurus Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan bahwa Camat Rambah telah mempunyai literatur / buku petunjuk bagi mereka untuk membuat program-program kerja.

Kemudian dari 14 orang responden pengurus Perangkat Desa yang terkategori baik sebanyak 1 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka juga merasakan Camat Rambah telah mempunyai literatur / buku petunjuk terutama mengenai konsolidasi Perangkat Desa, penyusunan program-program kerja.

Sementara itu dari 23 orang responden yang terkategori baik sebanyak 7 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka merasakan bahwa Camat Rambah pernah mempunyai literatur / buku petunjuk terutama tentang kedudukan mereka sebagai pimpinan masyarakat.

Selanjutnya juga diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden Perangkat Desa yang ada mempunyai literature/buku petunjuk yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai Perangkat Desa sebanyak 27 orang atau (43%) dikategorikan cukup baik dari 27 orang tersebut sebanyak 5 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka menyatakan bahwa Camat Rambah kurang lengkap literturnya / serta buku petunjuknya yang digunakan sebagai suatu pedoman pekerjaan seperti dalam penyusunan suatu kebijakan dan keputusan Kecamatan.

Selanjutnya dari 27 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 6 orang adalah pengurus Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan bahwa Camat

Rambah kurang lengkap literturnya / serta buku petunjuknya untuk membuat program-program kerja, setiap bulannya bahwa program kerja tahunan.

Selanjutnya dari 27 orang responden pengurus Perangkat Desa yang terkategori cukup baik sebanyak 7 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka juga merasakan Camat Rambah kurang lengkap literturnya / serta buku petunjuknya terutama mengenai kegiatan Perangkat Desa, penyusunan program-program kerja Perangkat Desa.

Sementara itu dari 27 orang responden yang terkategori cukup baik sebanyak 3 orang adalah Perangkat Desa dimana mereka merasakan bahwa Camat Rambah kurang lengkap literturnya / serta buku petunjuknya bagi mereka terutama tentang kedudukan dan peran mereka sebagai pimpinan masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan sosial dan mereka jarang diberi petunjuk.

Dari tanggapan berbagai responden Perangkat Desa yang ada bahwa tentang adanya buku petunjuk dan literatur yang dilakukan oleh Camat Rambah terhadap 23 responden yang mengelola berbagai Perangkat Desa sebanyak 12 orang atau (19%) dikategorikan kurang baik dari 12 orang tersebut sebanyak 4 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka menyatakan bahwa Camat Rambah tidak ada mempunyai literatur / buku petunjuknya pada mereka untuk menjalankan dan melakukan suatu kegiatan seperti dalam penyusunan anggaran Kecamatan.

Kemudian dari 12 orang responden yang terkategori kurang baik sebanyak 3 orang adalah pengurus Perangkat Desa dimana mereka juga menyatakan bahwa Camat

Rambah tidak lengkap literturnya / serta buku petunjuknya yang bertujuan untuk membuat program-program kerja.

Selanjutnya dari 12 orang responden pengurus Perangkat Desa yang terkategoriikan baik sebanyak 1 orang adalah anggota Perangkat Desa dimana mereka juga merasakan Camat Rambah tidak kurang lengkap literturnya / serta buku petunjuknya terutama mengenai setiap kegiatan Perangkat Desa, penyusunan program-program kerja.



BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan rangkaian penelitian Evaluasi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Perangkat Desa Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas berada pada kategori Cukup Baik yang dilihat dari lima Indikator Evaluasi Pembinaan antara lain Pemberian Bimbingan yang dilakukan Camat berjalan dengan Cukup Baik berdasarkan persentase 65% , memberikan Pengarahan yang dilakukan Camat berjalan dengan Baik berdasarkan persentase 73%, Memberikan Pendidikan dan Latihan yang dilakukan Camat berjalan dengan Baik berdasarkan persentase 74%, memberi instruksi-instruksi yang dilakukan Camat berjalan dengan Baik berdasarkan persentase 73%, dan dengan Menggunakan literature yang digunakan Camat sebagai buku petunjuk dalam melaksanakan tugas nya dalam membina perangkat desa mendapatkan hasil yang Baik berdasarkan persentase 68%, dan dari keseluruhan indikator pembinaan oleh camat terhadap perangkat desa dapat disimpulkan tugas Camat dalam menjalankan perannya melakukan pembinaan terhadap perangkat desa yaitu berjalan dengan Cukup Baik.

B. Saran

1. Sebaiknya Camat selaku kepala pimpinan di wilayahnya dapat memberikan pembinaan yang lebih baik pada setiap Perangkat Desa yang ada terutama dengan memberikan dan latihan pada setiap anggota yang ada.

2. Dianjurkan tingkat kemampuan anggota Perangkat Desa agar dapat lebih baik dalam memahami setiap instruksi yang disampaikan oleh Camat guna menjalankan setiap kegiatan yang ada.
3. Sebaiknya Camat dapat menyediakan atau mengadakan buku pedoman baru guna penyesuaian terhadap perubahan zaman yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita , Rahardjo. 2011, manajemen pemerintahan daerah, yogyakarta

Barata, Atep, 2004, dasar-dasar pelayanan prima, jakarta, Gramedia

Bratakusuma, Deddy Supriady dan Riyadi, 2005 . Perencanaan pembangunan daerah.
Jakarta . PT Gramedia Pustaka Utama

Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik; Teori Dan Proses*. PT. Buku Kita

Budiarjo, Miriam, 2003, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Djaenuri, 1998, *Teori Pengembangan dan Filosof Kepemimpinan Kerja*, Jakarta,
Bharata.

Dunn, William N, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta,
Gadjah Mada University Press.

Kadir, Abdul, Karding, 2008, *Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Semarang*.
Semarang.

Kartohadikusumo. Soetardjo. 1984, *Desa*, Jakarta, Gunung Agung

Leo Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Moekijat. 1999. *Manajemen Sumberdaya manusia*. Bandung; Mandar Maju

Manullang, M. 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Universitas Gajah Mada Press

Moennir, H. AS, 2002, *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Namawi. Hadari. 1987, *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press

Naccholls, Michell, 2005, *Terj. Pemerintahan Dalam Kecamatan*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press

Nugroho Riant. 2008. *Public Police*. Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo

Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi Beberapa Konstruksi Utama*, Banten: Penerbit Cradentia Center

Ratminto & Atik Septi Winaarsih, 2008, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Riant, Dr. Nugroho, 2009, *Public Police*, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo

Santoso, Purwo, Hasrul Hanif, Rachmad Gustomi.2004. Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sunarno, Siswanto, 2005. Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Dokumentasi:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kecamatan.

Buku Pedoman Penulisan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013, Universitas Islam Riau.

